

**Faktor- Faktor Penghambat Implementasi Aplikasi SIORMAS (Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan) & SIULA (Sistem Informasi Umum Layanan Administrasi) Pada Organisasi Kemasyarakatan : Studi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Della Meisica  
NPM 2216021135**



**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik  
Universitas Lampung  
Bandar Lampung  
2026**

**Faktor- Faktor Penghambat Implementasi Aplikasi SIORMAS (Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan) & SIULA (Sistem Informasi Umum Layanan Administrasi) Pada Organisasi Kemasyarakatan : Studi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung**

**Oleh**

**Della Meisica**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2026**

## ABSTRAK

### **Faktor- Faktor Penghambat Implementasi Aplikasi SIORMAS (Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan) & SIULA (Sistem Informasi Umum Layanan Administrasi) Pada Organisasi Kemasyarakatan : Studi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung**

Oleh  
**DELLA MEISICA**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi aplikasi SIORMAS dan SIULA dalam pelayanan administrasi organisasi kemasyarakatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, yang terlihat dari rendahnya jumlah organisasi yang melakukan aktivasi dan perpanjangan secara digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penghambat implementasi menggunakan model George C. Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, serta diuji dengan triangulasi dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi telah berjalan namun belum optimal. Faktor komunikasi dan sumber daya menjadi hambatan utama, terutama pada sosialisasi yang belum berkelanjutan, keterbatasan SDM dan anggaran, serta kendala teknis server. Disposisi pelaksana sudah cukup baik dan struktur birokrasi telah memiliki SOP yang jelas, meskipun kapasitas pelaksana masih terbatas. Diperlukan penguatan komunikasi dan dukungan sumber daya untuk meningkatkan efektivitas implementasi.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, SIORMAS, SIULA, Organisasi Kemasyarakatan

## **ABSTRACT**

### ***Inhibiting Factors in the Implementation of the SIORMAS and SIULA Applications for Community Organizations: A Study at the Regional Office of National Unity and Politics of Lampung Province***

**By**

**DELLA MEISICA**

*This study is motivated by the inadequate implementation of the SIORMAS and SIULA applications in administrative services for community organizations at the Regional Office of National Unity and Politics of Lampung Province, as indicated by the low number of organizations conducting activation and renewal through the digital system. This study aims to analyze the inhibiting factors of implementation using George C. Edward III's policy implementation model, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collection techniques consisting of interviews, observation, and documentation. Data analysis is conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing, and is validated through triangulation and member checking. The results show that the implementation of the applications has been carried out but is not yet optimal. Communication and resources are the main inhibiting factors, particularly in terms of unsustained socialization, limited human resources and budget, as well as technical server issues. The disposition of implementers is generally positive, and the bureaucratic structure already has clear standard operating procedures, although the capacity of implementers remains limited. Therefore, strengthening communication and resource support is necessary to improve implementation effectiveness.*

*Keywords: Policy Implementation, SIORMAS, SIULA, Community Organizations*

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **FAKTOR- FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI APLIKASI SIORMAS (SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN) & SIULA (SISTEM INFORMASI UMUM LAYANAN ADMINISTRASI) PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN : STUDI DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Della Meisica**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2216021135**

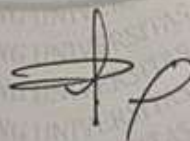
Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

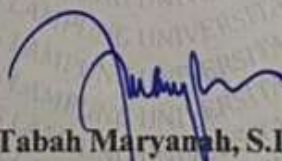
**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing



**Drs. Ismono Hadi, M.Si.**  
NIP. 196211271989021002

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

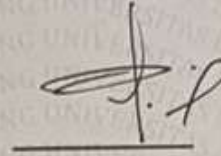


**Dr. Tabah Maryamah, S.I.P., M.Si.**  
NIP. 197106042003122001

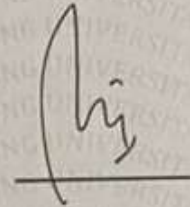
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Drs. Ismono Hadi, M.Si.**



**Penguji : Prof. Arizka Warganegara, Ph.D**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.**

**NIP. 197608212000032001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 21 April 2026**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 April 2026  
Yang Membuat Pernyataan



Della Meisica  
NPM 2216021135

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Della Meisica, lahir di Bukit Kemuning pada tanggal 3 Mei 2003. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

Penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri 1 Bukit Kemuning dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Bukit Kemuning dan lulus pada tahun 2018, serta melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Bukit Kemuning dan lulus pada tahun 2021.

Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Selama masa perkuliahan, penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sri Busono, Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, penulis juga mengikuti program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) selama 6 (enam) bulan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana, penulis menyusun skripsi dengan judul: “Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Aplikasi SIORMAS (Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan) dan SIULA (Sistem Informasi Umum Layanan Administrasi) pada Organisasi Kemasyarakatan: Studi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.”

## **MOTTO**

”Ketika saya berdamai dengan keadaan, saya berhenti mengeluh tentang badai dan mulai menguatkan perahu”

**(Sherly Tjoanda)**

”Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

**(Q.S Al-Insyirah: 5-6)**

”Sebab Tuhan telah berjanji, setelah sempit ada kemudahan”

**(Raim Laode)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta sholawat dan salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan rasa bahagia dan juga rasa syukur, saya persembahkan karya ini sebagai tanda sayang dan terima kasih kepada orang tuaku tercinta yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat. Terima kasih atas segala pengorbanan yang selalu diusahakan untuk dapat mencapai tahap ini. Semoga bisa menjadi pembuka langkah rezeki kesuksesan saya untuk memberikan kalian kasih sayang yang lebih lagi kedepannya.

Dengan penuh rasa bangga dan rasa lega juga saya persembahkan karya ini untuk diri saya sendiri.

Serta

Almamater Tercinta

Universitas Lampung, Khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

## SANWACANA

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas berkat, rahmat. Dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Faktor- Faktor Penghambat Implementasi Aplikasi SIORMAS (Sistem Informasi Organisasi Masyarakat) & SIULA (Sistem Informasi Umum Layanan Administrasi) Pada Organisasi Masyarakat : Studi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung"**. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Pada proses menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, masukan, saran, bantuan, dorongan, serta kritik dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si. Selaku ketua jurusan ilmu pemerintahan.
4. Bapak Himawan Indrajat, S.I.P., M.Si. Selaku dosen pembimbing akademik.
5. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Bapak Prof. Arizka Warganegara, Ph.D. selaku dosen penguji.
7. Seluruh dosen dan staff jurusan ilmu pemerintahan universitas lampung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas ilmu pengetahuan serta arahan dan bantuan yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa.
8. Kepada orang tuaku tercinta, Mama dan Ayah yang sangat aku sayangi, terima kasih atas ketulusan menjadi orang tua yang terus memberikan kasih

sayang yang hangat walaupun dengan keadaan yang sudah berbeda. Setiap perjalanan penulis dalam menulis skripsi ini merupakan atas ridho dan doa yang setiap harinya kalian panjatkan.

9. Kepada Ayuk Ovie, Kakak Riski dan Ponakan ku Rayyan yang tersayang, terima kasih telah memberikan kebahagiaan dan menjadi penyemangat penulis.
10. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan dari awal masa perkuliahan hingga saat ini dan sampai seterusnya, Aliyah, Aini, Lia, Montes, Puri, dan Weda. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang saling mendukung dalam hal apapun, menjadi tempat untuk bercerita keluh kesah di masa perkuliahan dan juga berbagi kebahagiaan yang kita saling berikan.
11. Kepada sahabat kecilku, Eliza dan Oci. Terima kasih telah mendukung dan memberi semangat walaupun dengan jarak dan tempat yang berbeda-beda, menjadi sahabat yang selalu sama sedari kecil hingga sekarang yang sedang mencapai cita-cita masing-masing.
12. Kepada para sahabat dari masa SMP, Kalista, Aldi, Tika, Vivin, Julian. Terima kasih telah memberikan tawa disaat kita semua berkumpul walaupun hanya di beberapa kesempatan di setiap tahunnya, terima kasih atas dukungan serta candaan yang menjadi penyemangat bagi penulis.
13. Kepada para sahabat dari masa SMK, Nisa, Uti, Lia, Dhanti, dan Mpit. Terima kasih tetap menjadi sahabat disaat susah maupun senang tanpa memandang apapun itu.
14. Kepada Sahabat Kost, Eva, Vina, Suyen. Terima kasih atas perhatian yang sudah seperti saudara dirumah dan menjadi keluarga keluarga keluarga kedua di perantauan.
15. Kepada Puri dan Ridho terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu bercerita tentang apapun itu, yang selalu memberikan masukan untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya.
16. Kepada teman-teman magang di Kesbangpol, Nara, Bela, Fadia dan Fatur. Terima kasih telah menjadi teman saat proses magang dan memulai skripsi di akhir semester ini.

17. Kepada teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2022, terima kasih telah memberikan cerita dari awal hingga akhir perkuliahan ini.
18. Kepada Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, Khususnya Bidang Ketansos, terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat disaat magang, juga atas dedikasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis dari awal magang sampai penelitian skripsi.
19. Kepada Informan Penelitian yang sudah bersedia menjadi narasumber untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
20. Terakhir, Kepada diri saya sendiri. Terima kasih sudah bertahan hingga saat ini dengan perjalanan yang tidak mudah. Terima kasih untuk terus

Bandar Lampung, 21 April 2026

Penulis

Della Meisica

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>v</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Teori Implementasi Kebijakan .....	11
2.1.1 Komunikasi.....	11
2.1.2 Sumber Daya .....	12
2.1.3 Disposisi .....	12
2.1.4 Struktur Birokrasi .....	13
2.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan .....	13
2.3 Strategi Implementasi Kebijakan Publik.....	15
2.4 Definisi Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) .....	16
2.5 Tujuan Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) .....	18
2.6 Syarat Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) .....	19
2.7 Aplikasi SIORMAS & SIULA.....	21
2.7.1 Aplikasi SIORMAS .....	21
2.7.2 Aplikasi SIULA .....	22
2.8 Kerangka Pikir .....	23
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>
3.1 Tipe Penelitian.....	26
3.2 Fokus Penelitian .....	27
3.3 Lokasi Penelitian.....	30
3.4 Sumber Data.....	30
3.5 Informan Penelitian.....	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.7 Teknik Analisis Data .....	37
3.8 Teknik Keabsahan Data.....	38
<b>IV. GAMBARAN UMUM</b> .....	<b>40</b>
4.1 Sejarah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.....	40

4.2	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
4.3	Tugas dan Fungsi .....	46
4.4	Struktur Organisasi.....	47
4.5	Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung .....	54
<b>V.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
5.1	Hasil Penelitian .....	58
5.1.1	Indikator Komunikasi .....	59
5.1.2	Indikator Sumber Daya .....	73
5.1.3	Indikator Struktur Birokrasi.....	82
5.1.4	Indikator Disposisi.....	86
5.1.5	Aspek Pengawasan dan Pembinaan (Politik).....	96
5.2	Pembahasan.....	100
5.2.1	Indikator Komunikasi .....	100
5.2.2	Indikator Sumber Daya .....	111
5.2.3	Indikator Struktur Birokrasi.....	115
5.2.4	Indikator Disposisi.....	119
5.2.5	Aspek Pengawasan dan Pembinaan (Politik).....	127
5.2.6	Optimalisasi Penggunaan Aplikasi SIORMAS dan SIULA.....	128
5.3	Analisis Menyeluruh dan Rekomendasi Kebijakan.....	130
<b>VI.</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>133</b>
6.1	Kesimpulan .....	133
6.2	Saran.....	134
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>136</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kendala Implementasi SIORMAS & SIULA .....	2
Tabel 1.2 Rekapitulasi Jumlah Organisasi yang Melaporkan Keberadaannya Per Tahun 2021-2025 di Provinsi Lampung.....	4
Tabel 1.3 Rekapitulasi Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Belum Menggunakan Aplikasi SIORMAS dan SIULA di Provinsi Lampung Tahun 2021–2024 .....	5
Tabel 1.4 Kondisi SDM Pengelola Aplikasi SIORMAS Dan SIULA di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2025.....	6
Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	34
Tabel 4.1 Dasar Hukum Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.....	45
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Sampai Dengan Desember 2024.....	46
Tabel 4.3 Komposisi ASN pada Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Berdasarkan Pendidikan .....	54
Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana.....	56
Tabel 5.1 Rekapitulasi Jumlah Organisasi yang Melaporkan Keberadaannya Per Tahun 2021-2025 di Provinsi Lampung.....	103
Tabel 5.2 Rekapitulasi Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Belum Menggunakan Aplikasi SIORMAS dan SIULA di Provinsi Lampung Tahun 2021–2024 .....	103
Tabel 5.3 Kondisi SDM Pengelola Aplikasi SIORMAS Dan SIULA di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2025.....	112
Tabel 5.4 Perbandingan Kebutuhan Ideal dan Realita Anggaran Implementasi SIORMAS dan SIULA.....	115
Tabel 5.5 Perbandingan Disposisi Baik dan Disposisi Kurang Baik .....	125

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tampilan awal aplikasi SIORMAS (Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan).....	22
Gambar 2.2 Tampilan awal aplikasi SIULA (Sistem Informasi Umum Layanan Administrasi) .....	23
Gambar 2.3 Kerangka Pikir.....	25
Gambar 4.1 Struktur organisasi badan kesatuan bangsa dan politik daerah provinsi lampung.....	48
Gambar 5.1 Struktur Organisasi Bidang Ketansos .....	116
Gambar 5.2 Standar Pelayanan di Unit Layanan Administrasi Kemendagri 2021 .....	118

## DAFTAR SINGKATAN

<b>Singkatan</b>	<b>Kepanjangan</b>
ASN	Aparatur Sipil Negara
CAPS	Center for Academic Publishing Service
Ditjen	Direktorat Jenderal
EDS	Edwards III
IT	Information Technology
Jo.	Juncto
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kesbangpol	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
MK	Mahkamah Konstitusi
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
Ormas	Organisasi Kemasyarakatan
P3K	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
PT	Perseroan Terbatas
RI	Republik Indonesia
SIORMAS	Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan
SIULA	Sistem Informasi Umum Layanan Administrasi
SK	Surat Keputusan
SDM	Sumber Daya Manusia
TI	Teknologi Informasi
UU	Undang-Undang
SERVQUAL	Service Quality
Ditjen Polpum	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
IPOLEKSOSBUD	Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya
LKjIP	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PTHL	Pegawai Tidak Harian Lepas
RENSTRA	Rencana Strategis
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian diubah menjadi Perpu No. 2 tahun 2017 dan kemudian ditetapkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017. Ormas atau Organisasi Kemasyarakatan adalah suatu organisasi yang terbentuk juga didirikan secara sukarela oleh masyarakat dengan tujuan memenuhi kesamaan aspirasi, kebutuhan, kepentingan juga mencapai tujuan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 5 UU 17/2013 jo. Putusan MK 82/2013 ada beberapa ketentuan mengenai pembentukan ormas yang ditujukan untuk kepentingan kontribusi pada pembangunan nasional dan upaya pelestarian persatuan bangsa. Perubahan UU No. 16 Tahun 2017 memberikan ketentuan yang lebih kuat dibandingkan UU 17/2013 terkait penegasan terhadap ormas yang bertentangan dengan prinsip Pancasila.

UU No. 17 tahun 2013 menentukan bahwa ormas harus memiliki legalitas yang formal dengan melakukan registrasi pada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pemerintah daerah melalui kesbangpol dalam registrasi. Legalitas sangat penting untuk menjadikan semua kegiatan ormas menjadi formal, mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan registrasi, dan tidak ditemukan bahwa ormas tersebut ilegal. Namun pada prakteknya, masih banyak ormas yang tidak memiliki legalitas yang formal dikarenakan kurangnya informasi mengenai proses registrasi dan akses yang terbatas pada layanan digital.

Dengan demikian, untuk menyelesaikan masalah tersebut, Kemendagri menciptakan aplikasi SIORMAS (Sistem Informasi Organisasi Sosial) dan SIULA (Sistem Informasi Umum Layanan Organisasi). Tujuan utama kedua aplikasi ini adalah mempermudah proses pendaftaran, pelaporan, pendidikan, dan pengawasan

organisasi massa, sebagai realisasi berani dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Massa. Peraturan tersebut membantu menerapkan manajemen organisasi massa berbasis yang memiliki orientasi pada transparansi dan akuntabilitas. Namun, secara praktis, beberapa hambatan tetap ada, antara lain digital literasi .

Menurut pengamatan dan data yang dikumpulkan dari Kesbangpol Provinsi Lampung, penerapan aplikasi SIORMAS dan SIULA belum maksimal. Meski aplikasi ini telah dirancang untuk membantu proses pencatatan data, penyampaian laporan, dan pembinaan organisasi masyarakat, faktanya masih ada sejumlah masalah di lapangan. Pertama, masih banyak organisasi masyarakat yang belum melakukan pendaftaran atau update data mereka secara berkala sehingga membuat data yang tercatat di SIORMAS dan SIULA tidak komprehensif. Kedua, masih rendahnya tingkat kesadaran organisasi masyarakat dalam penyampaian laporan secara berkala menjadi lebih parah karena kurangnya penalti yang efektif untuk meningkatkan kesadaran tersebut. Ketiga, kemampuan SDM yang terbatas baik di Kesbangpol maupun di pengurus organisasi, terutama digital literasi, menjadi hambatan dalam proses pengisian dan pendaftaran.

Pada saat yang sama, penghambatan berkaitan dengan faktor finansial serta ketersediaan infrastruktur teknologi informasi pada level provinsi dan distrik/kota turut menjadi kendala bagi penyebaran dan pemeliharaan sistem aplikasi tersebut. Selain itu, proses koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih belum terintegrasi sepenuhnya dengan prosedur administrasi yang homogen, akibatnya muncul beberapa jenis mekanisme verifikasi dan pelaporan dalam setiap wilayahnya. Sosialisasi yang kurang optimal membuat beberapa administrator di lembaga masyarakat tidak mengetahui nilai serta kepentingan dari penggunaan aplikasi ini.

Selain itu, masalah tersebut tidak hanya berpengaruh dalam manajemen data teknis saja melainkan juga menjadi kendala efektivitas perkembangan serta supervisi organisasi masyarakat. Data yang tidak akurat maupun usang mungkin akan memicu munculnya titik buta tentang organisasi masyarakat yang memiliki permasalahan sehingga berdampak pada presisi kebijakan pembangunan. Karena

itu, studi kasus ini sangatlah penting untuk menganalisis hasil implementasi SIORMAS dan SIULA, mempelajari faktor-faktor hambatan, memahami dampaknya terhadap kinerja kesbangpol dan merumuskan strategi implementasi kedua aplikasi tersebut.

Secara efektif, kesbangpol berfungsi sebagai jembatan penghubung antara pemerintahan sentral Kemendagri dengan organisasi masyarakat setempat. Jika tidak ada kerja keras dari Kesbangpol, maka aplikasi SIORMAS dan SIULA hanyalah proses formal saja, sebab terdapat tidak adanya keterlibatan yang secara nyata dari pengguna utama aplikasi.

Selain itu, di Provinsi Lampung, Kesbangpol mulai memandu semua organisasi masyarakat yang ada untuk secara resmi melakukan pendaftaran melalui SIORMAS dengan membantu dan mendampingi mereka secara teknis serta memberikan penyuluhan. Selain itu, Kesbangpol pun melaporkan hasil data penyerapan kepada pemerintah pusat, Kemendagri, dalam rangka upaya nasional untuk memorganisir organisasi masyarakat. Namun, beberapa hambatan juga ditemukan dalam implementasi tersebut, seperti rendahnya literasi digital di kalangan pengurus organisasi masyarakat, minimnya pengetahuan mengenai pentingnya pendaftaran, serta terbatasnya sdm dan infrastruktur di internal Kesbangpol. Kesbangpol berperan sebagai fasilitator antara ormas dan juga pemerintah.

Berdasarkan data dari Badan Kesbangpol Provinsi Lampung tahun 2025, tercatat bahwa jumlah organisasi kemasyarakatan yang melaporkan keberadaannya setiap bulan masih tergolong fluktuatif dan relatif rendah. Selama periode Januari hingga Juni 2025, hanya terdapat 52 organisasi yang melapor. Pada bulan Januari terdapat 12 organisasi yang melapor, meningkat menjadi 15 organisasi pada bulan Februari, namun mengalami penurunan drastis menjadi hanya 5 organisasi pada bulan Maret. Kemudian jumlahnya kembali naik pada April menjadi 10 organisasi, tetapi menurun lagi menjadi 4 organisasi pada bulan Mei, dan sedikit meningkat menjadi 6 organisasi pada bulan Juni. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan

organisasi dalam melaporkan keberadaannya masih belum konsisten dan belum merata di setiap bulan.

Ormas di Provinsi Lampung yang belum mengisi melakukan implementasi pada aplikasi siormas dan siula masih tergolong cukup banyak yang setiap tahunnya. Jumlah ormas aktif yang ada di Provinsi Lampung berkisar antara 540 hingga 818 ormas, meskipun jumlah ormas aktif yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, tingkat partisipasi penggunaan kedua aplikasi tersebut masih tergolong cukup rendah yang artinya sebagian besar ormas belum memanfaatkan layanan digital yang diberikan. Hal tersebut berindikasi adanya hambatan dalam pengimplementasian kedua aplikasi tersebut di lingkungan ormas dan juga Kesbangpol.

Untuk jumlah SDM yang menangani aplikasi SIORMAS dan SIULA masih sangat terbatas, baik dari sisi jumlah personel maupun kompetensi teknis. Jumlah operator aktif hanya dua orang, yang bahkan merangkap pekerjaan lain, sementara jumlah organisasi kemasyarakatan yang harus dikelola mencapai ratusan. Kondisi ini menyebabkan proses pendataan, validasi, dan pembaruan data ormas berjalan lambat. Selain itu, minimnya pelatihan teknis serta sarana prasarana yang belum memadai turut memperburuk efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi administrasi ormas di Provinsi Lampung.

Masalah tersebut mengindikasikan masih adanya hambatan dalam sistem pelaporan organisasi, baik dari segi kesadaran hukum organisasi maupun dari sisi teknis, seperti kurangnya pemahaman penggunaan aplikasi digital yang telah disediakan pemerintah, yaitu SIORMAS dan SIULA. Rendahnya angka pelaporan ini menjadi salah satu alasan penting untuk mengkaji implementasi kedua aplikasi tersebut, guna melihat apakah aplikasi sudah berjalan efektif, serta apa saja kendala yang dihadapi oleh organisasi maupun pihak Badan Kesbangpol sebagai fasilitator. Dengan demikian, data ini menjadi pijakan awal untuk memahami urgensi peningkatan sistem pendataan organisasi melalui digitalisasi, demi mendukung tertib administrasi, pengawasan ormas, serta terciptanya tata kelola organisasi masyarakat yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, data tersebut menjadi relevan dalam mendorong pentingnya dilakukannya penelitian mengenai implementasi aplikasi SIORMAS dan SIULA oleh organisasi kemasyarakatan di Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kedua aplikasi tersebut telah berfungsi secara efektif dalam mempermudah proses pelaporan keberadaan organisasi, serta untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang menyebabkan masih rendahnya tingkat pelaporan oleh ormas. Dengan mengetahui faktor-faktor penghambat tersebut, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang tepat guna meningkatkan partisipasi ormas dalam pelaporan, serta mendorong optimalisasi peran Badan Kesbangpol sebagai fasilitator dalam proses digitalisasi administrasi organisasi kemasyarakatan.

Penelitian mengenai implementasi digitalisasi layanan publik, khususnya yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan (ormas), telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dan memiliki keselarasan serta kesinambungan dengan fokus penelitian ini.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Yusni, Ahmad, dan Ismail (2022)	Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan pada Badan	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan sistem informasi pendaftaran ormas berbasis web mampu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Kesbangpol dan Humas Provinsi Aceh Berbasis Web	mempercepat proses pendaftaran serta mempermudah penginputan dan pengelolaan data organisasi masyarakat. Sistem yang dirancang juga berhasil mengurangi hambatan birokrasi yang sebelumnya terjadi pada pelayanan manual, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di lingkungan Badan Kesbangpol dan Humas Provinsi Aceh.
Alief Maripatullah dkk. (2023)	Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Organisasi Masyarakat Berbasis Web	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen ormas berbasis web mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan organisasi, khususnya dalam administrasi data anggota, pendataan kegiatan organisasi, serta mendukung komunikasi internal antar pengurus. Implementasi sistem ini juga berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Permana (2023)	Evaluasi Kualitas Pelayanan Administrasi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Badan Kesbangpol Kota Semarang	Penelitian ini menemukan bahwa kualitas pelayanan administrasi pendaftaran ormas di Badan Kesbangpol Kota Semarang secara umum tergolong cukup baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi kualitas pelayanan, terutama terkait keterbatasan sarana digital, lambannya responsivitas petugas, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan pendaftaran ormas.
Aisyah Nuraminah dkk. (2021)	Pendampingan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Upaya Digitalisasi Data Organisasi Kemasyarakatan Asing	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan dan pelatihan literasi digital memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman serta kemampuan ormas asing dalam memanfaatkan sistem digital. Digitalisasi data organisasi kemasyarakatan asing dinilai dapat berjalan lebih efektif apabila didukung oleh kesiapan pengguna, pemahaman teknologi, serta partisipasi aktif dari kelompok sasaran.

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Muhammad Ali dkk. (2022)	Implementasi Program Digitalisasi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram	Penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi program digitalisasi layanan publik belum sepenuhnya berjalan optimal. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan teknis bagi aparatur, serta dukungan infrastruktur teknologi yang masih belum memadai. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program digitalisasi dalam pelayanan publik.

Dari kelima penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa transformasi pelayanan publik berbasis digital dalam konteks organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan akan mengikuti pada kejelasan kebijakan, kesiapan lembaga pelaksana, dukungan sumber daya, serta partisipasi kelompok sasaran. Namun, belum adanya penelitian yang membahas secara spesifik faktor-faktor yang menghambat implementasi aplikasi SIORMAS dan SIULA di Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III sebagai kerangka analisis. Oleh karena itu, penelitian ini penting karena berupaya mengisi kesenjangan dalam penelitian sebelumnya dengan memberikan alasan yang jelas tentang tantangan implementasi kebijakan digital dalam pengelolaan organisasi masyarakat di tingkat provinsi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor penghambat dalam optimalisasi penggunaan aplikasi SIORMAS dan SIULA dalam pengelolaan organisasi kemasyarakatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung?
2. Bagaimana optimalisasi penggunaan aplikasi SIORMAS (Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan) dan SIULA (Sistem Informasi Umum Layanan Organisasi) dalam meningkatkan efektivitas pendaftaran, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan Ormas di Provinsi Lampung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan dan strategi yang dihadapi dalam mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIORMAS dan SIULA dalam pengelolaan organisasi masyarakat oleh Badan Kesbangpol Provinsi Lampung.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian ingin dicapai seperti yang telah diuraikan diatas, adapun manfaat penelitian di antaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis :  
Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan studi Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik, transformasi digital dalam tata kelola, dan peran pemerintah daerah dalam pelayanan publik berbasis teknologi. Melalui studi ini, diharapkan akan muncul pemahaman baru mengenai bagaimana pemerintah, dalam hal ini Badan Kesbangpol, menggunakan aplikasi digital seperti SIORMAS dan SIULA untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan organisasi masyarakat.
2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi aplikasi SIORMAS dan SIULA, serta mengidentifikasi strategi yang tepat guna meningkatkan kualitas layanan terhadap organisasi kemasyarakatan.
- b) Bagi ormas di Provinsi Lampung, hasil penelitian ini memberikan informasi dan pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran dan pengelolaan administrasi secara digital sebagai upaya untuk memperoleh legalitas yang sah.
- c) Bagi pemerintah daerah secara umum, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penguatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan partisipasi masyarakat secara tertib hukum melalui sistem informasi pemerintahan berbasis teknologi.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Teori Implementasi Kebijakan**

Model implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III telah diterapkan dalam banyak studi tentang analisis kebijakan publik. Sebagai kutipan dari Subarsono (2011:90-92), ada empat variabel kunci yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga jika salah satu variabel tidak berhasil akan menjadi penghambat.

#### **2.1.1 Variabel Komunikasi**

Komunikasi menjadi unsur penting pada implementasi kebijakan sebab komunikasi mempengaruhi bagaimana kebijakan disampaikan kepada pelaksana dan pihak yang menjadi sasaran. Karakteristik komunikasi yang baik diukur dari tingkat jelas, konsisten, dan kesamaan data. Apabila komunikasi tidak optimal, hal tersebut berpotensi memunculkan penafsiran yang keliru, sehingga menyebabkan tidak adanya penerapan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah disebutkan (Edward III, 1980; Agustino, 2020). Berdasarkan implementasi aplikasi SIORMAS dan SIULA, komunikasi yang kurang optimal dapat menimbulkan pelaksana atau operator yang tidak memahami mekanisme kerja sistem, sehingga mengakibatkan keterlambatan dan juga rendahnya partisipasi ormas dalam menggunakan aplikasi.

Sub-indikator komunikasi:

- 1) Sosialisasi kebijakan – hingga sejauh mana penyebaran informasi mengenai kebijakan penggunaan SIORMAS dan SIULA diberikan kepada implementer maupun organisasi kemasyarakatan.

- 2) Informasi yang jelas – kualitas pemahaman implementer mengenai petunjuk teknis serta tujuan dari kebijakan tersebut.
- 3) Konsistensi intruksi

### **2.1.2 Variabel Sumber Daya**

Sumber daya adalah salah satu faktor kunci dalam mengidentifikasi peluang atau kesempatan untuk penerapan sebuah kebijakan tersebut. Walaupun suatu kebijakan telah ditempuh dengan baik, namun kebijakan ini tetap tidak dapat berhasil tanpa adanya sumber daya yang cukup. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, pendanaan, serta fasilitas lainnya yang diperlukan dalam penerapan kebijakan tertentu (Winarno, 2022). Pada kasus penelitian kali ini, penerapan kebijakan SIORMAS dan SIULA akan menjadi lebih efektif jika memiliki staff yang memahami teknologi di bidang layanan digital, anggaran yang cukup serta fasilitas yang memadai.

Sub-indikator sumber daya:

- 1) Sumber daya manusia (SDM) - kemampuan pegawai Kesbangpol dalam penggunaan aplikasi SIORMAS dan SIULA.
- 2) Sarana dan prasarana - keberadaan alat komputer, internet, dan sarana pendukung lainnya.
- 3) Sumber daya finansial - cukupnya anggaran untuk penyuluhan, sosialisasi, serta perawatan aplikasi sistem.
- 4) Waktu pelaksanaan – waktu yang diberikan untuk proses pendaftaran

### **2.1.3 Variabel Disposisi**

Pelaksanaan atau disposisi meliputi kemauan, komitmen, dan juga integritas aparatur dalam melaksanakan kebijakan. Meskipun telah ada komunikasi dan juga sumber daya yang memadai, proses implementasi tetap akan mengalami hambatan apabila pelaksana tidak berdisposisi positif terhadap kebijakan tersebut. Apabila pelaksana berdisposisi baik, maka akan mendorong pelaksana untuk menjalankan kebijakan dengan tanggung jawab penuh, begitu juga sebaliknya apabila disposisi pelaksana buruk, maka hal tersebut akan menjadi hambatan bagi pelaksanaan kebijakan

Sub-indikator disposisi:

- 1) Pemahaman terhadap tujuan kebijakan – kesadaran pegawai terhadap manfaat dan tujuan digitalisasi administrasi ormas.
- 2) Komitmen pelaksana – keseriusan aparaturnya dalam mengimplementasikan kebijakan SIORMAS dan SIULA.
- 3) Motivasi dan tanggung jawab kerja – dorongan dan etos kerja pelaksana dalam menyelesaikan tugas administrasi berbasis digital.

#### **2.1.4 Variabel Struktur Birokrasi**

Birokrasi struktur bertindak sebagai struktur organisasi yang berfungsi menjadi wadah penyebaran kebijakan. Struktur yang ringkas, mudah, dan menggunakan SOP akan mendorong penyebaran kebijakan lebih baik. Sedangkan jika struktur tersebut memiliki jenjang panjang dan tidak terorganisir dengan baik, maka hal tersebut akan memberi dampak negatif berupa efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan (Winarno, 2022). Pada SIORMAS dan SIULA, kekurangan struktur birokrasi dapat mengakibatkan tumpang tindih tugas. Sub-indikator struktur birokrasi:

- 1) Klarifikasi SOP – adanya SOP dan implementasinya pada tahap input dan validasi data ormas.
- 2) Koordinasi inter-unit – seberapa jauh bagian-bagian di Kesbangpol melakukan koordinasi dalam melaksanakan kebijakan digitalisasi.
- 3) Penugasan kerja (fragmentasi) – kecocokan dan efisiensi penugasan kerja di antara pegawai dalam melaksanakan

#### **2.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan publik pada dasarnya adalah proses penerjemahan keputusan politik ke dalam tindakan nyata oleh aktor-aktor pelaksana di lapangan. Namun, implementasi sering menghadapi hambatan yang membuat tujuan kebijakan tidak tercapai secara optimal. Menurut literatur administrasi publik, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan, yaitu:

### **2.2.1 Komunikasi yang Tidak Efektif**

Kebijakan yang baik tidak akan berjalan apabila informasi terkait isi, tujuan, serta mekanisme kebijakan tidak disampaikan dengan jelas kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Distorsi komunikasi atau penyampaian informasi yang berlapis dapat menimbulkan salah tafsir. *Edward III (1980)* menegaskan bahwa komunikasi yang buruk antara pembuat kebijakan dan pelaksana menjadi salah satu hambatan utama implementasi.

### **2.2.2 Sumber Daya yang Terbatas**

Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, termasuk pendanaan, infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia. Kendala anggaran atau staf yang tidak kompeten seringkali menjadi faktor penghambat yang signifikan. George C. Edwards III juga mengidentifikasi sumber daya sebagai variabel penting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.

### **2.2.3 Disposisi atau Sikap Pelaksana**

Sikap, komitmen, dan motivasi para pelaksana kebijakan memengaruhi hasil implementasi. Jika para pelaksana kurang memiliki kemauan politik atau bahkan menolak kebijakan tersebut, implementasi akan terhambat. Van Meter dan Van Horn (1975) menekankan bahwa disposisi para pelaksana merupakan variabel penting dalam model implementasi kebijakan.

### **2.2.4 Struktur Birokrasi yang Kaku**

Birokrasi yang terlalu panjang, prosedural, dan berbelit-belit dapat memperlambat pelaksanaan kebijakan. Fragmentasi kewenangan antar lembaga juga menimbulkan tumpang tindih sehingga implementasi tidak berjalan efektif. *Edward III (1980)* menyebutkan bahwa struktur birokrasi yang tidak efisien menjadi penghambat implementasi karena menciptakan koordinasi yang lemah.

### **2.3 Strategi Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik adalah proses menerjemahkan keputusan politik ke dalam program, kegiatan, dan tindakan konkret yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk implementasi yang efektif, diperlukan strategi yang terencana dengan baik. Menurut literatur administrasi publik, strategi implementasi kebijakan publik dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **2.3.1 Membangun Komunikasi yang Efektif**

Komunikasi antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan kelompok sasaran harus jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan multi-tafsir. Strategi yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Menyusun pedoman teknis yang rinci.
- b) Melakukan sosialisasi kebijakan secara intensif.
- c) Menggunakan media komunikasi yang mudah dipahami masyarakat.

Teori Edward III (1980) menegaskan bahwa kejelasan dan konsistensi komunikasi merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi.

#### **3.3.2 Penguatan Sumber Daya**

Kebijakan publik hanya dapat diimplementasikan secara optimal jika didukung oleh sumber daya yang memadai. Strategi yang perlu diimplementasikan adalah:

- a) Menyediakan anggaran yang cukup dan tepat sasaran.
- b) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan.
- c) Memperkuat fasilitas dan infrastruktur pendukung.

Menurut Edward III, ketersediaan sumber daya adalah salah satu variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi.

#### **2.3.3 Meningkatkan Komitmen dan Disposisi Pelaksana**

Aparatur pelaksana perlu memiliki sikap positif, dedikasi, dan integritas dalam menjalankan kebijakan. Strategi yang dapat diterapkan:

- a) Menanamkan pemahaman tentang pentingnya kebijakan bagi masyarakat.
- b) Memberikan insentif atau penghargaan bagi pelaksana yang berprestasi.

- c) Membangun budaya kerja yang transparan dan akuntabel. Meter & Horn (1975) menyebut disposisi atau sikap pelaksana sebagai salah satu variabel krusial dalam implementasi kebijakan.

#### **2.3.4 Penyederhanaan Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan kaku seringkali menghambat implementasi. Oleh karena itu, strategi yang dapat diimplementasikan meliputi:

- a) Mengurangi proses birokrasi yang berbelit-belit.
- b) Membentuk gugus tugas khusus untuk mempercepat implementasi.
- c) Meningkatkan koordinasi antar unit/lembaga terkait.

Edward III menekankan bahwa struktur organisasi yang efisien akan mempermudah implementasi kebijakan.

#### **2.4 Definisi Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)**

Organisasi masyarakat, yang lebih dikenal sebagai Ormas, merupakan salah satu bentuk implementasi kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945. Keberadaan Ormas menyediakan forum bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, berpartisipasi dalam pembangunan, dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat bersama dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, "Ormas merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela dengan adanya tujuan beraspirasi, mempunyai keinginan, dan yang jelas dalam pembangunan dan mencapai tujuan NKRI." Definisi ini menekankan bahwa Ormas dibentuk bukan sekadar perkumpulan, melainkan memiliki peran strategis dalam kehidupan nasionalis terhadap negara.

Sejalan dengan hal tersebut, Eureka (2022) dalam buku Pengantar Hukum Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia mendefinisikan Ormas sebagai "organisasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat secara sukarela, berdasarkan kesamaan aspirasi, kepentingan, profesi, agama, maupun kepercayaan tertentu, yang dibentuk untuk berpartisipasi dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara serta mendukung tercapainya tujuan nasional.” Definisi ini memberikan penekanan bahwa Ormas lahir dari kesadaran masyarakat, bersifat independen, dan memiliki tujuan yang sejalan dengan kepentingan bangsa.

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Ormas memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

1. Sukarela: lahir dari inisiatif masyarakat tanpa adanya paksaan.
2. Kesamaan aspirasi: dibentuk karena adanya kesamaan visi, misi, kepentingan, profesi, atau keyakinan tertentu.
3. Partisipasi pembangunan: berfungsi sebagai sarana untuk turut serta dalam pembangunan nasional, baik dalam bidang sosial, politik, budaya, maupun ekonomi.
4. Kedudukan hukum: keberadaannya diakui dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, sehingga memiliki legitimasi formal dalam kehidupan nasional.

Dengan demikian, Ormas tidak hanya berperan sebagai wadah bagi masyarakat untuk berkumpul, melainkan juga sebagai bagian penting dari masyarakat sipil (*civil society*) yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi demokratisasi, pembangunan, serta kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Selain definisi yang tertuang dalam undang-undang maupun buku ajar hukum, beberapa pakar juga memberikan penjelasan mengenai pengertian Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Definisi dari para ahli ini penting untuk memperkuat landasan teoretis penelitian, sekaligus memberikan gambaran yang lebih luas mengenai hakikat dan fungsi Ormas dalam kehidupan masyarakat.

### 1. **Jimly Asshiddiqie (2006)**

Menurut Jimly, Ormas adalah wadah pengelompokan masyarakat secara sukarela yang lahir dari kesamaan aspirasi, kebutuhan, maupun kepentingan, dengan tujuan memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam demokrasi serta menjadi saluran komunikasi politik antara rakyat dan pemerintah. Definisi ini menekankan peran Ormas sebagai salah satu unsur penting dalam *civil society* yang dapat memperkuat demokrasi.

### 2. **Soetandyo Wignjosoebroto (2002)**

Soetandyo mendefinisikan Ormas sebagai organisasi yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, yang keberadaannya tidak semata-mata dibentuk oleh negara, melainkan muncul dari kesadaran sosial untuk mengartikulasikan kepentingan bersama. Definisi ini menekankan aspek kemandirian Ormas dari negara, sekaligus sebagai wujud nyata dari kebebasan berserikat.

### 3. **Salman Luthan (2014)**

Menurut Salman Luthan, Ormas merupakan entitas hukum yang dibentuk oleh sekelompok orang dengan tujuan memperjuangkan kepentingan sosial, politik, ekonomi, maupun budaya secara kolektif dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penekanan diberikan pada legitimasi hukum Ormas serta kedudukannya sebagai aktor sosial dalam pembangunan bangsa.

### 4. **Eureka (2022)**

Seperti telah diuraikan pada subbab sebelumnya, Eureka mendefinisikan Ormas sebagai sebuah organisasi yang tumbuh secara sukarela berdasarkan aspirasi, minat, profesi, agama, atau kepercayaan tertentu yang sama, yang dibentuk untuk berpartisipasi dalam kehidupan nasional dan negara serta mendukung pencapaian tujuan nasional. Definisi ini mempertegas fungsi Ormas sebagai elemen masyarakat sipil yang mendukung pembangunan nasional.

## **2.5 Tujuan Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)**

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dibentuk bukan hanya sebagai wadah berkumpulnya masyarakat, melainkan juga memiliki fungsi sosial, politik, maupun kultural yang lebih luas. Beberapa ahli memberikan pandangan mengenai tujuan utama pembentukan Ormas sebagai berikut:

1. **Jimly Asshiddiqie (2006)**

Menurut Jimly, tujuan pembentukan Ormas adalah untuk menjadi wahana partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi, sebagai saluran aspirasi, serta alat kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Dengan kata lain, Ormas merupakan sarana yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan negara.

2. **Soetandyo Wignjosoebroto (2002)**

Menurut Soetandyo, Ormas dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat yang tidak sepenuhnya dapat ditampung oleh institusi negara. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa ruang publik tetap menjadi wadah ekspresi masyarakat sipil.

3. **Salman Luthan (2014)**

Salman Luthan menyebutkan bahwa tujuan Ormas adalah mewujudkan keteraturan sosial dan memperkuat integrasi masyarakat dalam kerangka NKRI. Ormas dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat kohesi sosial dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan.

4. **Eureka (2022)**

Dalam buku Pengantar Hukum Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia, Eureka menegaskan bahwa pembentukan Ormas bertujuan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, memperjuangkan kepentingan kelompok secara sah, dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Ormas tidak hanya dilihat sebagai perkumpulan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari sistem demokrasi modern.

## **2.6 Syarat Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)**

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (diubah dengan UU No. 16 Tahun 2017) dan Permendagri No. 57 Tahun 2017, pembentukan ormas harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

### **1. Pendiri dan Anggota**

- a) Ormas dapat didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) orang warga negara Indonesia.
- b) Ormas juga dapat didirikan oleh badan hukum berbentuk perkumpulan atau yayasan.

- c) Ormas tidak boleh didirikan oleh warga negara asing secara tunggal, namun warga negara asing dapat menjadi anggota dengan syarat tertentu.

## **2. Nama dan Identitas Ormas**

- a) Nama ormas harus berbeda dengan nama ormas lain yang sudah ada/terdaftar.
- b) Tidak boleh menggunakan nama/lembaga negara, TNI, Polri, serta lembaga internasional tanpa persetujuan.
- c) Identitas organisasi (nama, lambang, bendera) wajib didaftarkan secara resmi.

## **3. Asas, Tujuan, dan Fungsi**

- a) Ormas wajib berasaskan Pancasila dan UUD 1945.
- b) Tujuan ormas harus sejalan dengan prinsip NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
- c) Tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum.

## **4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)**

Ormas wajib memiliki AD/ART yang memuat ketentuan paling sedikit mengenai:

1. Nama, lambang, serta bendera;
2. Tujuan dan fungsi;
3. Mekanisme kepengurusan;
4. Keanggotaan;
5. Mekanisme pengambilan keputusan;
6. Sumber keuangan.

## **5. Legalitas dan Pendaftaran**

- a) Ormas berbadan hukum → mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM.
- b) Ormas tidak berbadan hukum → mendaftarkan diri ke Kesbangpol provinsi/kabupaten/kota atau Ditjen Politik & Pemerintahan Umum Kemendagri.
- c) Pendaftaran bertujuan untuk mendapatkan pencatatan resmi sehingga kegiatan ormas diakui secara hukum.

## **6. Larangan dalam Pembentukan Ormas**

Selain syarat-syarat di atas, ada beberapa larangan yang harus dipatuhi:

- a) Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan ormas lain.
- b) Dilarang bertujuan memisahkan diri dari NKRI atau menganut ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
- c) Tidak boleh melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum atau mengarah pada kegiatan kriminal.

### **2.7 Aplikasi SIORMAS & SIULA**

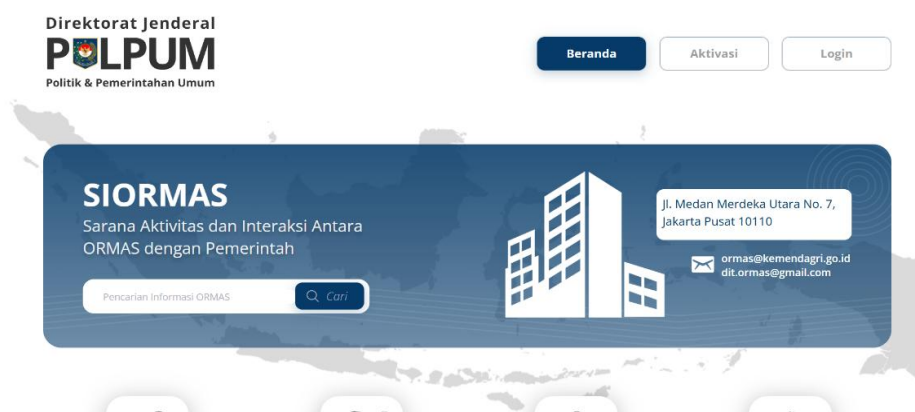
Aplikasi SIORMAS (Sistem Organisasi Kemasyarakatan) dan SIULA (Sistem Laporan Organisasi) merupakan bagian dari inovasi digital yang dikembangkan oleh Kemendagri melalui DirjenPolpum. Kedua sistem ini dirancang untuk memperbaiki tata kelola organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia melalui digitalisasi proses pendaftaran, pengelolaan, pelaporan, dan pengawasan ormas. Penerapan SIORMAS dan SIULA bertujuan meningkatkan efektivitas administrasi, memperkuat transparansi, serta memudahkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun sama-sama berbasis daring, keduanya memiliki fungsi utama yang berbeda: SIORMAS berfokus pada manajemen data dan legalitas ormas, sedangkan SIULA menitikberatkan pada pelaporan kegiatan ormas secara berkala.

#### **2.7.1 Aplikasi SIORMAS**

SIORMAS adalah platform daring yang berfungsi sebagai basis data nasional untuk seluruh ormas yang terdaftar di Indonesia. Sistem ini memungkinkan pendaftaran ormas secara elektronik, termasuk verifikasi dokumen pendirian, pengesahan badan hukum, dan pembaruan data kepengurusan. Menurut Kementerian Dalam Negeri RI (2020), SIORMAS dibangun untuk mengatasi permasalahan administrasi yang selama ini cenderung manual, memakan waktu, dan rawan inkonsistensi data. Gambaran awal aplikasi ini menampilkan beranda dengan menu utama seperti Registrasi Ormas Baru, Perubahan Data Ormas, Monitoring Status Pengajuan, serta Pencarian Ormas Terdaftar.

Dengan adanya SIORMAS, pemerintah dapat memantau keberadaan ormas di setiap daerah secara real time, meminimalkan duplikasi data, serta mengintegrasikan informasi dengan sistem lain di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Namun, tantangan yang dihadapi mencakup rendahnya literasi digital pengurus ormas, keterbatasan koneksi internet di daerah, dan kurangnya pelatihan teknis bagi operator daerah.

Berikut Adalah tampilan awal aplikasi Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS) :



Gambar 2.1 Tampilan awal aplikasi SIORMAS (Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan)

Sumber : Dokumentasi Peneliti, (2025)

### 2.7.2 Aplikasi SIULA

SIULA merupakan sistem layanan administrasi berbasis daring yang digunakan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk melakukan pengajuan dan pengelolaan dokumen administrasi kepada Badan Kesbangpol Provinsi Lampung. Melalui aplikasi ini, ormas dapat melakukan proses pendaftaran dan pengajuan layanan administrasi, termasuk pengunggahan berkas persyaratan untuk penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Keberadaan SIULA bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui digitalisasi proses administrasi, sehingga alur pengajuan menjadi lebih tertib, terdokumentasi, dan mudah dipantau.

Gambaran awal SIULA menunjukkan adanya fitur utama seperti pengisian data ormas, unggah dokumen persyaratan, riwayat pengajuan, serta pemantauan status proses verifikasi berkas. Keunggulan SIULA terletak pada kemampuannya menyediakan arsip digital dokumen ormas yang tersusun rapi sehingga memudahkan proses pemeriksaan administrasi oleh operator, serta mempercepat pelayanan karena berkas dapat diakses tanpa harus dilakukan secara manual. Namun demikian, hambatan yang ditemukan dalam implementasi SIULA antara lain masih rendahnya pemahaman sebagian ormas terkait alur pengajuan digital, kesalahan dalam mengunggah dokumen (misalnya format tidak sesuai atau dokumen tidak lengkap), serta kendala teknis seperti keterbatasan jaringan internet yang menyebabkan proses unggah berkas menjadi lambat atau gagal.

Berikut adalah tampilan awal aplikasi SIULA (Sistem Informasi Umum Layanan Administrasi) yang digunakan dalam proses layanan administrasi ormas di Badan Kesbangpol Provinsi Lampung. Berikut adalah tampilan awal aplikasi SIULA (Sistem Informasi Umum Layanan Administrasi) :



Gambar 2.2 Tampilan awal aplikasi SIULA (Sistem Informasi Umum Layanan Administrasi)  
Sumber : Dokumentasi Peneliti, (2025)

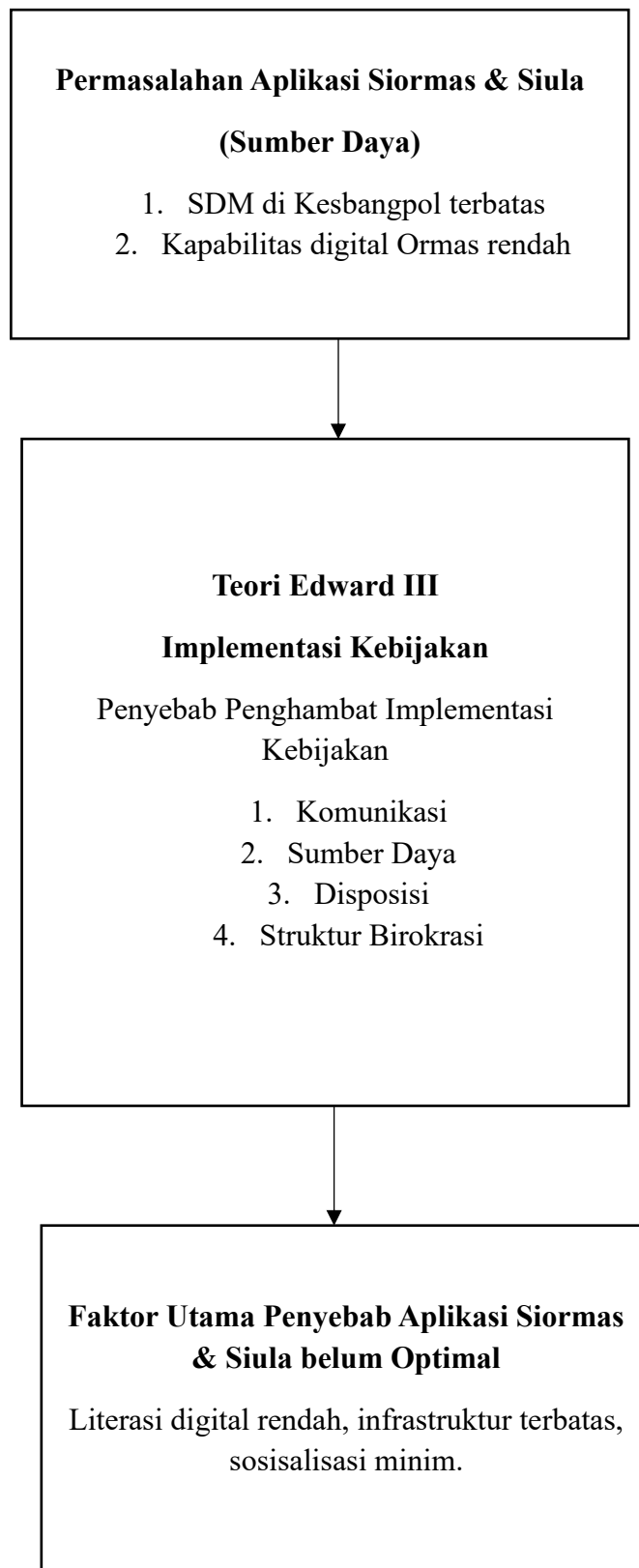
## 2.8 Kerangka Pikir

Permasalahan utama dalam implementasi aplikasi Siormas dan Siula di Kesbangpol terletak pada aspek sumber daya, baik di tingkat internal maupun eksternal. Di internal Kesbangpol, keterbatasan jumlah serta kapasitas SDM menjadi hambatan

dalam pengelolaan aplikasi. Sementara itu, di sisi organisasi kemasyarakatan, kapabilitas digital yang masih rendah turut memperburuk optimalisasi pemanfaatan aplikasi.

Selain itu, terdapat faktor-faktor penghambat lain yang menyebabkan aplikasi ini belum berjalan optimal, yaitu rendahnya literasi digital di kalangan pengguna, keterbatasan infrastruktur teknologi, minimnya sosialisasi dari pihak Kesbangpol, serta birokrasi yang cenderung lambat.

Untuk menganalisis masalah-masalah ini, studi ini menggunakan kerangka teori Edward III tentang implementasi kebijakan publik, yang menekankan empat variabel kunci: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan teori ini, masalah-masalah yang muncul dalam implementasi aplikasi Siormas dan Siula dapat dipetakan secara sistematis untuk menentukan sejauh mana faktor-faktor ini memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi bagi organisasi massa. Kerangka ini menghubungkan masalah implementasi kebijakan dengan teori Edward III untuk menghasilkan analisis yang komprehensif. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang faktor-faktor penghambat serta strategi peningkatan dalam mengoptimalkan penggunaan aplikasi Siormas dan Siula dalam lingkungan Kesbangpol.



Gambar 2.3 Kerangka Pikir

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai masalah atau realitas sosial yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian terletak pada pemahaman mendalam terhadap proses, makna, dan dinamika yang terjadi di balik suatu peristiwa sosial, bukan pada perhitungan angka atau pengujian hipotesis. Melalui tipe penelitian ini, peneliti berupaya menafsirkan kondisi nyata di lapangan dengan menggali pengalaman, pandangan, serta persepsi para informan terkait pelaksanaan kebijakan atau program tertentu.

Menurut Yuliani (2018) dalam artikelnya yang berjudul "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling", penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang umumnya digunakan dalam fenomena sosial karena membutuhkan deskripsi yang mendalam dan rinci. Ia menyatakan bahwa, "penelitian deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran rinci tentang latar, proses, dan eksplorasi bagaimana suatu peristiwa terjadi." Lebih lanjut, Yuliani menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif juga bertujuan untuk memahami makna tersembunyi di balik tindakan sosial, agar penelitian tidak hanya mendeskripsikan fakta, tetapi juga menjelaskan konteks dan alasan di baliknya.

Dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti berupaya memahami faktor-faktor penghambat dalam implementasi aplikasi SIORMAS (Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan) dan SIULA (Sistem Informasi

Usaha dan Lembaga) secara mendalam dari perspektif pelaksana kebijakan maupun pengguna sistem. Pendekatan ini dipakai agar dapat mendapatkan informasi fakta yang dihadapi di lapangan, baik dari segi teknis, struktural, maupun sumber daya manusia, tanpa melakukan manipulasi terhadap kondisi yang ada. Selain itu, penelitian deskriptif kualitatif memberikan hasil bagi peneliti dalam mengetahui dinamika sosial dan administratif yang terjadi secara asli, sehingga hasilnya dapat mencerminkan keadaan objektif serta memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan implementasi kebijakan digital di lingkungan Kesbangpol.

Selain itu, jenis penelitian ini juga memungkinkan peneliti untuk menangkap keterlibatan berbagai aktor dalam implementasi kebijakan, hubungan antar departemen, serta persepsi dan respons terhadap kebijakan digitalisasi pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan pandangan Yuliani (2018) bahwa dalam penelitian deskriptif kualitatif, analisis dilakukan secara berkala mulai dari sebelum memasuki lapangan, selama proses pengumpulan data, hingga setelah penelitian selesai, melalui tahapan reduksi data, penyajian data (penampilan data), dan penarikan kesimpulan. Oleh karena itu, jenis penelitian ini sangat relevan untuk mencapai tujuan penelitian yang menekankan pemahaman kontekstual tentang hambatan dan tantangan implementasi aplikasi SIORMAS dan SIULA untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik di bidang organisasi masyarakat.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini mempunyai fokus pada teori implementasi kebijakan yang telah dikemukakan oleh George C. Edward III (1980), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini saling terkait dan memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Jika salah satu dari variabel ini gagal berfungsi dengan baik, implementasi kebijakan dapat terhambat (Edward III, 1980; Agustino, 2020).

Dalam konteks penelitian ini, teori Edward III digunakan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat implementasi aplikasi SIORMAS (Sistem Informasi

Organisasi Kemasyarakatan) dan SIULA (Sistem Informasi Umum Layanan Administrasi) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung. Adapun fokus dan Variabel & indikator penelitian dijabarkan sebagai berikut:

### **3.2.1 Variabel Komunikasi**

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, karena berkaitan dengan bagaimana kebijakan disampaikan kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan salah interpretasi dan berdampak pada rendahnya pemahaman pelaksana terhadap kebijakan (Edward III, 1980; Agustino, 2020).

Dalam implementasi aplikasi SIORMAS dan SIULA, komunikasi yang lemah dapat menyebabkan operator dan aparatur Kesbangpol tidak memahami mekanisme sistem secara menyeluruh, sehingga terjadi keterlambatan dalam input data dan rendahnya partisipasi organisasi kemasyarakatan.

Indikator komunikasi:

1. Sosialisasi kebijakan – sejauh mana informasi mengenai penggunaan SIORMAS dan SIULA disampaikan kepada pelaksana dan ormas.
2. Kejelasan informasi – tingkat pemahaman pelaksana terhadap petunjuk teknis dan tujuan kebijakan digitalisasi.

### **3.2.2 Variabel Sumber Daya**

Sumber daya yang memadai merupakan syarat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya manusia, finansial, dan fasilitas yang cukup, kebijakan akan sulit dijalankan secara optimal (Winarno, 2022).

Dalam konteks Kesbangpol Provinsi Lampung, pelaksanaan SIORMAS dan SIULA membutuhkan pegawai yang memahami teknologi informasi serta didukung oleh sarana, prasarana, dan anggaran yang mencukupi.

Indikator sumber daya:

1. Sumber daya manusia (SDM) – kompetensi pegawai dalam mengoperasikan aplikasi SIORMAS dan SIULA.

2. Sarana dan prasarana – ketersediaan perangkat, jaringan internet, serta infrastruktur penunjang lainnya.

### **3.2.3 Variabel Disposisi (Sikap Pelaksana)**

Sikap berkaitan dengan kemauan, komitmen, dan integritas para pelaksana kebijakan. Sekalipun komunikasi dan sumber daya sudah baik, implementasi tetap akan terhambat jika para pelaksana tidak memiliki sikap positif terhadap kebijakan tersebut. (Edward III, 1980; Agustino, 2020).

Dalam pelaksanaan aplikasi SIORMAS dan SIULA, sikap dan kemauan pegawai Kesbangpol menjadi kunci dalam menerima serta menjalankan kebijakan digitalisasi administrasi ormas.

Indikator disposisi :

1. Komitmen pelaksana – keseriusan aparatur dalam menjalankan kebijakan digitalisasi.
2. Motivasi kerja – dorongan dan tanggung jawab pelaksana dalam menyelesaikan tugas administrasi berbasis sistem digital.

### **3.2.4 Variabel Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi menentukan alur koordinasi dan kejelasan pembagian tugas antar unit dalam implementasi kebijakan. Struktur yang jelas dengan prosedur operasi standar (SOP) akan memfasilitasi implementasi kebijakan, sementara struktur yang panjang dan tumpang tindih dapat menyebabkan inefisiensi. (Winarno, 2022).

Dalam konteks Kesbangpol, struktur birokrasi yang kurang efektif dapat menghambat koordinasi antarbagian dan memperlambat pelayanan administrasi ormas.

Indikator struktur birokrasi:

1. Kejelasan SOP – penerapan standar operasional dalam proses input dan validasi data ormas.
2. Koordinasi antarunit – sejauh mana bidang-bidang di Kesbangpol bekerja sama dalam melaksanakan kebijakan digitalisasi.

Berdasarkan teori Edward III, fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasi aplikasi SIORMAS dan SIULA pada

Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dengan meninjau empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, beserta indikator-indikator pendukungnya.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat untuk peneliti mendapatkan informasi dan deskripsi yang lebih jelas dan lengkap guna menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk melakukan penelitian di Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, yang berlokasi di Jalan Wolter Monginsidi No. 69, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah karena Kesbangpol Provinsi Lampung merupakan instansi yang secara langsung mengelola dan mengawasi implementasi aplikasi SIORMAS dan SIULA. Selain itu, lokasi ini dipilih karena peneliti juga pernah melaksanakan program magang di instansi tersebut, sehingga memudahkan dalam mengakses data, melakukan wawancara, serta memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian.

### **3.4 Sumber Data**

Dalam penelitian kualitatif, sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mendalam tentang masalah yang sedang diteliti. Menurut Sugiyono (2013:308), sumber data dalam penelitian kualitatif yang dibagi menjadi dua kategori: data primer dan data sekunder.

#### **3.4.1 Data Primer**

Data primer diperoleh langsung dari sumber primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, laporan, arsip, atau literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari: Menurut Sugiyono (2019:225), data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara, observasi, atau penyebaran kuesioner kepada responden. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang terlibat langsung dalam implementasi aplikasi

SIORMAS (Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan) dan SIULA (Sistem Informasi Umum Layanan Administrasi) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung.

Informan meliputi:

- a) Pejabat struktural di bidang Ketahanan Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Provinsi Lampung.
- b) Staf teknis atau operator pengelola aplikasi SIORMAS dan SIULA.
- c) Perwakilan organisasi kemasyarakatan yang menggunakan atau berinteraksi dengan sistem tersebut.

Data ini diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi langsung guna memahami faktor-faktor penghambat implementasi dari aspek teknis, administratif, dan sumber daya manusia.

### **3.4.2 Data Sekunder**

Menurut Bungin (2017:132), data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber sekunder atau data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain, seperti dokumen resmi, arsip, laporan, atau literatur ilmiah. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan sumber pendukung, antara lain: Laporan Evaluasi Kinerja Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2024.

- a) Dokumen kebijakan dan panduan teknis dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait aplikasi SIORMAS dan SIULA (Kemendagri, n.d.).
- b) Artikel ilmiah, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu seperti Khumaidi dan Irsyad (2023) yang membahas hambatan pengawasan ormas di Kesbangpol Provinsi Lampung.
- c) Peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana dan Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Kombinasi data primer dan sekunder ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif dan faktual tentang implementasi aplikasi SIORMAS dan SIULA di Kesbangpol Provinsi Lampung.

### 3.5 Informan Penelitian

Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif, penentuan informan dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap paling mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Moleong (2018:132), informan dalam penelitian kualitatif dipilih bukan untuk mewakili populasi, melainkan karena mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan fokus penelitian.

Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor penghambat implementasi aplikasi SIORMAS dan SIULA di lingkungan Badan Kesbangpol Lampung. Oleh karena itu, informan penelitian dipilih dari berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan aplikasi tersebut, baik sebagai pelaksana, pengelola, maupun pengguna layanan.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan karena penelitian berfokus pada pemahaman yang mendalam mengenai implementasi aplikasi SIORMAS dan SIULA dalam pelayanan ormas, sehingga diperlukan informan yang benar-benar memahami, terlibat, dan memiliki pengalaman langsung terkait objek penelitian.

Proses pemilihan informan diawali dengan identifikasi aktor-aktor kunci yang terlibat dalam implementasi SIORMAS dan SIULA di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Informan dipilih berdasarkan posisi struktural, peran teknis, serta keterlibatan langsung dalam proses perumusan kebijakan, pelaksanaan operasional, hingga pemanfaatan aplikasi oleh pengguna eksternal.

Kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Memiliki jabatan atau peran strategis dalam pengelolaan organisasi kemasyarakatan dan kebijakan digitalisasi pelayanan publik.
2. Terlibat secara langsung dalam pelaksanaan, pengelolaan, atau pengoperasian aplikasi SIORMAS dan SIULA.

3. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai terkait prosedur pelayanan pendaftaran, pendataan, dan pelaporan organisasi kemasyarakatan.
4. Mewakili berbagai tingkat pelaksana kebijakan, mulai dari pengambil kebijakan, pelaksana teknis, hingga pengguna layanan.

Berdasarkan kriteria tersebut, informan penelitian terdiri dari pejabat struktural yang bertanggung jawab terhadap kebijakan implementasi SIORMAS dan SIULA, pejabat pelaksana operasional, staf teknis atau operator sistem, aparatur administrasi pelayanan ormas, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan sebagai pengguna aplikasi. Dengan komposisi informan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memperoleh data yang komprehensif, mendalam, dan berimbang mengenai implementasi kebijakan digitalisasi pelayanan organisasi kemasyarakatan.

Penggunaan teknik purposive sampling dinilai tepat karena penelitian ini tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi secara statistik, melainkan untuk menggali secara mendalam proses, kendala, serta faktor pendukung implementasi SIORMAS dan SIULA berdasarkan pengalaman dan perspektif informan yang relevan.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

<b>Nama Informan</b>	<b>Jabatan/Peran</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Alasan Memilih Informan</b>
M Jauhari	KepalaBidang Ketahanan Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan	Penanggung jawab kebijakan implementasi SIORMAS dan SIULA di tingkat provinsi.	Dipilih karena memiliki kewenangan dalam perumusan, pengambilan keputusan, serta pengawasan kebijakan implementasi SIORMAS dan SIULA, sehingga mampu memberikan gambaran strategis terkait tujuan, kebijakan, dan arah pelaksanaan sistem tersebut.
Nita Dwi Safitri	Pengelola Teknis / Operator SIORMAS dan SIULA	Bertanggung jawab terhadap input data, pengoperasian sistem, dan pemecahan kendala teknis.	Dipilih karena memiliki pengalaman teknis langsung dalam pengoperasian SIORMAS dan SIULA, sehingga dapat memberikan informasi mendalam terkait kendala teknis, efektivitas sistem, serta kesiapan infrastruktur teknologi.
Virzen	Staf administrasi bidang ormas	Terlibat dalam pelayanan administrasi dan pengumpulan berkas organisasi kemasyarakatan.	Dipilih karena berinteraksi langsung dengan organisasi kemasyarakatan dalam proses administrasi, sehingga dapat memberikan perspektif terkait efektivitas pelayanan, prosedur kerja, serta perubahan pelayanan sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi digital.

<b>Nama Informan</b>	<b>Jabatan/Peran</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Alasan Memilih Informan</b>
Iqbal Ardiansyah & Ruzham Hafani	Ketua / Sekretaris Ormas terdaftar	Sebagai pengguna eksternal yang menggunakan aplikasi SIORMAS untuk proses pendaftaran dan pelaporan kegiatan.	Dipilih untuk memperoleh sudut pandang pengguna eksternal terkait kemudahan akses, transparansi, serta manfaat dan kendala penggunaan SIORMAS dalam proses pendaftaran dan pelaporan kegiatan ormas.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti (2025)

Pemilihan informan tersebut dilakukan untuk memperoleh perspektif yang beragam, baik dari sisi pembuat dan pelaksana kebijakan (pemerintah daerah) maupun dari pihak pengguna (ormas). Dengan demikian, peneliti dapat memahami secara komprehensif berbagai hambatan yang muncul, baik dari aspek teknis, struktural, maupun sumber daya manusia. Jumlah informan dalam penelitian ini bersifat fleksibel sesuai prinsip ketercukupan data (*data saturation*). Artinya, proses wawancara akan selesai jika data yang diperoleh telah dianggap jenuh dan tidak ada lagi informasi baru yang muncul.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan secara alami dan mendalam untuk memperoleh informasi komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Menurut Sugiyono (2013:309), teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dilakukan secara simultan dan berkelanjutan hingga data dianggap jenuh.

Penelitian ini menggunakan tiga teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu:

#### **1. Wawancara (Interview)**

Wawancara dilakukan dengan metode semi-terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman umum namun tetap memberikan keleluasaan kepada informan untuk menjelaskan pandangan dan pengalamannya secara

mendalam. Melalui teknik ini, peneliti berinteraksi langsung dengan para informan yang terdiri atas pejabat struktural, staf teknis, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Lampung.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara langsung (tatap muka), yaitu wawancara yang dilakukan melalui pertemuan secara langsung antara peneliti dan informan tanpa perantara media. Wawancara langsung memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih mendalam dan kontekstual karena peneliti dapat menggali informasi secara langsung sekaligus mengamati sikap, ekspresi, dan bahasa tubuh informan selama proses wawancara berlangsung. Teknik ini dinilai efektif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengalaman, pandangan, dan kondisi faktual informan sesuai dengan fokus penelitian. (Sugiyono, 2019; Moleong, 2021)

Wawancara bertujuan untuk menggali informasi terkait:

- a) Pemahaman dan penerapan aplikasi SIORMAS dan SIULA,
- b) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya (baik teknis, sumber daya, maupun koordinasi),
- c) Upaya dan strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Teknik ini dipilih karena dapat memberikan data yang bersifat subjektif dan kontekstual mengenai pengalaman langsung para pelaksana kebijakan dan pengguna sistem.

## **2. Observasi (Observation)**

Observasi dilakukan secara langsung di Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Lampung untuk mengamati situasi kerja, interaksi antarpegawai, serta aktivitas operasional penggunaan aplikasi SIORMAS dan SIULA. Menurut Moleong (2018:174), observasi dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung dan observasi partisipatif di Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Lampung. Observasi langsung dilakukan dengan cara

peneliti hadir secara fisik di lokasi penelitian untuk mengamati situasi kerja, interaksi antarpegawai, serta aktivitas operasional penggunaan aplikasi SIORMAS dan SIULA secara nyata. Sementara itu, observasi partisipatif dilakukan dengan keterlibatan terbatas peneliti dalam lingkungan kerja, sehingga peneliti dapat memahami proses pengelolaan data organisasi kemasyarakatan, pola kerja pegawai, serta dinamika penggunaan sistem secara lebih mendalam dalam konteks alaminya.

### **3. Dokumentasi (Documentation)**

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi dengan bukti tertulis. Dokumen yang dikumpulkan meliputi:

- a) Laporan Evaluasi Kinerja Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2024,
- b) Dokumen pedoman teknis aplikasi SIORMAS dan SIULA dari Kemendagri,
- c) Data statistik jumlah ormas yang terdaftar melalui aplikasi,
- d) Notulen rapat, surat edaran, serta arsip internal Kesbangpol terkait pelaksanaan kebijakan digitalisasi layanan. Dokumentasi ini membantu peneliti dalam melakukan triangulasi data, yaitu membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumen agar diperoleh hasil yang valid dan dapat dipercaya.

Dengan menggunakan ketiga teknik tersebut, peneliti berupaya memperoleh data yang menyeluruh dan mendalam tentang faktor-faktor penghambat implementasi aplikasi SIORMAS dan SIULA, baik dari sisi teknis, sumber daya manusia, maupun aspek kelembagaan di lingkungan Kesbangpol Provinsi Lampung.

#### **3.7 Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari tahap pengumpulan data hingga selesainya penelitian. Proses analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, yang melibatkan beberapa tahapan saling terkait yang terjadi secara berputar/berulang.

### **1. Transkripsi Data**

Tahap awal analisis data adalah transkripsi data, yaitu proses mengubah data lisan hasil wawancara menjadi bentuk tertulis secara lengkap dan sistematis. Seluruh hasil wawancara langsung dengan informan ditranskripsikan secara verbatim untuk menjaga keutuhan makna dan konteks informasi yang disampaikan. Transkripsi data menjadi dasar utama dalam proses analisis karena memudahkan peneliti dalam membaca, menelaah, dan menelusuri kembali data lapangan secara cermat. (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2013; Moleong, 2018)

### **2. Koding Data**

Setelah data ditranskripsikan, tahap selanjutnya adalah koding data. Koding merupakan proses pemberian kode atau label pada bagian-bagian data yang relevan dengan fokus penelitian. Kode diberikan untuk menandai informasi penting yang berkaitan dengan faktor-faktor penghambat implementasi aplikasi SIORMAS dan SIULA, seperti kendala teknis, sumber daya manusia, koordinasi, dan aspek kelembagaan. Proses koding membantu peneliti menyederhanakan data dan mempermudah pengelompokan informasi. (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2013)

### **3. Kategorisasi dan Penentuan Tema**

Tahap selanjutnya adalah kategorisasi dan penentuan tema, yaitu proses pengelompokan kode-kode dengan makna serupa ke dalam kategori-kategori tertentu. Kategori-kategori ini kemudian dikembangkan menjadi tema-tema utama yang mencerminkan fokus dan tujuan penelitian. Melalui tahap ini, data yang telah dikodekan menjadi lebih terstruktur dan sistematis, sehingga memudahkan peneliti untuk memahami pola dan hubungan di antara data tersebut. (Moleong, 2018; Miles, Huberman, & Saldana, 2014)

### **4. Penyajian Data**

Setelah data dikategorikan dan tema ditentukan, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian ini berbentuk deskripsi naratif, yang disusun secara sistematis untuk mengilustrasikan temuan penelitian. Penyajian data bertujuan untuk memfasilitasi peneliti dalam melihat hubungan antar tema dan menyederhanakan proses pengambilan kesimpulan. (Moleong, 2018)

## **5. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Tahap akhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan makna data yang dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang ditarik bersifat sementara dan terus diverifikasi melalui triangulasi data untuk memastikan validitas temuan dapat dibenarkan secara ilmiah. (Miles, Huberman, & Saldana, 2014)

### **3.8 Teknik Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data diperlukan untuk menjamin validitas dan kredibilitas temuan penelitian. Menurut Moleong (2018:324), keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Untuk memenuhi kriteria tersebut, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi data.

#### **1. Triangulasi sumber**

Hal ini dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, data dari wawancara dengan pejabat struktural, staf teknis, dan perwakilan organisasi masyarakat dibandingkan satu sama lain untuk menentukan konsistensi informasi terkait implementasi aplikasi SIORMAS dan SIULA. Selanjutnya, informasi ini juga dibandingkan dengan observasi dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi data.

#### **2. Triangulasi metode**

Hal ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data wawancara mengenai hambatan implementasi SIORMAS dan SIULA diverifikasi melalui observasi lapangan langsung dan dokumen pendukung, seperti laporan internal dan peraturan terkait. Dengan demikian, temuan penelitian tidak semata-mata bergantung pada satu metode pengumpulan data saja.

### **3. Triangulasi data**

Hal ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh pada waktu, situasi, dan kondisi yang berbeda. Data yang dikumpulkan pada tahap awal penelitian dibandingkan dengan data yang dikumpulkan pada tahap selanjutnya untuk menentukan konsistensi informasi yang diperoleh. Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan stabil dan tidak berubah secara signifikan karena perbedaan waktu atau situasi penelitian. (Moleong, 2018)

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **4.1 Sejarah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung**

Pada awal pembentukannya, Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dikenal sebagai Badan Persatuan Nasional dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung. Lembaga ini merupakan hasil penggabungan antara Direktorat Sosial dan Politik serta Markas Besar Pertahanan Sipil Daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000. Pembentukan lembaga ini dimotivasi oleh kebutuhan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kehidupan politik masyarakat dan mendorong peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Melalui keberadaan lembaga ini, diharapkan dapat tercipta suasana kehidupan masyarakat yang terbuka, demokratis, dan berlandaskan nilai-nilai nasional, sekaligus mampu mengantisipasi dan mengatasi berbagai potensi masalah sosial yang berkembang di masyarakat Provinsi Lampung.

Seiring dengan perkembangan dinamika pemerintahan dan tuntutan penyelenggaraan birokrasi yang semakin kompleks, dilakukan penyempurnaan terhadap struktur dan nomenklatur lembaga tersebut. Hal ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan peraturan tersebut, nama Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung resmi diubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung. Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan penegasan fokus tugas dan fungsi lembaga dalam menangani urusan kesatuan bangsa, politik dalam negeri, serta penguatan stabilitas sosial dan politik di daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kesbangpol Provinsi Lampung berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dan Prosedur Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan peraturan ini, Badan Kesbangpol Provinsi Lampung memiliki tugas utama merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang persatuan dan politik nasional, membina ideologi dan wawasan nasional, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan masyarakat, serta politik dalam negeri. Selain itu, lembaga ini juga melaksanakan tugas-tugas bantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur, serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Lampung juga mengacu pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Cara Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknik Daerah Provinsi Lampung. Sebagai bentuk perencanaan strategis, Badan Kesbangpol Provinsi Lampung menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) untuk tahun 2015–2019, yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2015–2019. Renstra berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan badan tersebut agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan mendukung terciptanya stabilitas politik, ketahanan sosial, dan persatuan nasional di Provinsi Lampung.

#### **4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa merupakan fondasi nomor satu dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan aspirasi masyarakat serta mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintahan yang tepat, jelas, dan memiliki legitimasi hukum yang kuat. Sistem pertanggungjawaban ini berperan penting dalam memastikan bahwa setiap

proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, penerapan sistem pertanggungjawaban yang optimal juga bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dilakukan dengan mengacu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Prosedur Peninjauan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas formal organisasi kepada negara dan masyarakat atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diamanatkan. Selain itu, penyusunan LKjIP juga merupakan bagian dari upaya Dinas Persatuan dan Politik Nasional Provinsi Lampung dalam mendukung realisasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, baik di tingkat Provinsi Lampung khususnya maupun di tingkat nasional pada umumnya.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan secara berkala pada setiap akhir tahun anggaran dengan tujuan untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat pencapaian kinerja instansi. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan melalui perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 merupakan laporan kinerja ke-enam yang disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2019–2024, yang mencerminkan komitmen instansi dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Pembangunan merupakan salah satu konsep kunci dalam keberlangsungan penyelenggaraan tata pemerintahan di suatu daerah. Istilah pembangunan (development) memiliki dua dimensi makna yang saling melengkapi. Pertama,

pembangunan dipahami sebagai upaya yang berorientasi pada aspek material atau fisik, yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk mendukung kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Aspek ini menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur sebagai penunjang aktivitas pemerintahan dan masyarakat.

Kedua, pembangunan juga diarahkan pada aspek nonfisik, khususnya pembangunan sikap mental dan karakter masyarakat. Pembangunan sikap mental memiliki peran yang tidak kalah penting dibandingkan pembangunan fisik, karena berkaitan langsung dengan proses pembentukan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan dalam dimensi ini dipahami sebagai suatu proses “menjadi”, yaitu proses pembentukan jati diri dan karakter bangsa yang berkelanjutan, sejalan dengan tujuan negara dalam mewujudkan pembangunan karakter bangsa (*nation and character building*). Dengan demikian, pembangunan sikap mental merupakan landasan penting dalam menciptakan masyarakat yang berintegritas, berwawasan kebangsaan, dan memiliki kesadaran politik yang baik.

Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Lampung menerapkan metodologi pembangunan dengan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan preventif (*ideologis*) dan pendekatan reaktif (*praksis*). Pendekatan preventif dilakukan melalui berbagai kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas, seperti sosialisasi, sarasehan, seminar, lokakarya, serta pelatihan dan pendidikan di bidang wawasan kebangsaan dan politik dalam negeri. Kegiatan-kegiatan tersebut menysasar berbagai kelompok masyarakat, antara lain generasi muda, tokoh masyarakat, tokoh agama, cendekiawan, akademisi, praktisi organisasi kemasyarakatan atau LSM, serta politisi, dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan di Provinsi Lampung.

Metodologi pembangunan selanjutnya yang diterapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung adalah pendekatan reaktif atau praksis. Pendekatan ini dilaksanakan melalui kerja sama dan koordinasi antara Badan

Kesbangpol Provinsi Lampung dengan berbagai jajaran serta lembaga terkait lainnya dalam menganalisis beragam permasalahan yang muncul di masyarakat. Hasil analisis tersebut selanjutnya ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret sesuai kewenangan, serta dilaporkan kepada Gubernur Lampung sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.

Ruang lingkup dan wilayah kerja Badan Kesbangpol Provinsi Lampung tergolong luas dan kompleks, mencakup penguatan di berbagai bidang strategis, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (IPOLEKSOSBUD). Kondisi tersebut semakin dinamis seiring dengan perkembangan era reformasi nasional yang mendorong terciptanya iklim demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perubahan ini membawa dampak signifikan terhadap paradigma penyelenggaraan pemerintahan, yang sebelumnya bercorak sentralistik beralih menuju sistem desentralisasi. Pergeseran paradigma tersebut turut berimplikasi pada perubahan peran Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, yang dituntut untuk lebih adaptif dan responsif dalam menghadapi berbagai aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin demokratis.

Perubahan mendasar dalam paradigma pemerintahan, khususnya terkait dengan pelimpahan urusan dan kewenangan kepada pemerintah daerah, selain memberikan harapan dalam peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, juga memunculkan berbagai konsekuensi di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Kondisi tersebut memerlukan antisipasi melalui kinerja pemerintah daerah yang memiliki visi, misi, dan strategi yang terintegrasi dalam suatu sistem manajemen strategis, yang didukung oleh perencanaan strategis yang komprehensif. Perencanaan ini diharapkan mampu merespons berbagai permasalahan aktual bangsa, seperti potensi disintegrasi bangsa dan negara, konflik sosial dan politik, euforia reformasi dan otonomi daerah, serta dampak negatif globalisasi yang dapat menghambat pelaksanaan agenda reformasi nasional.

Selain itu, upaya tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mendorong pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

daerah. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, diperlukan aparatur pemerintahan yang profesional, berintegritas, jujur, serta memiliki disiplin kerja yang tinggi, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dapat berjalan secara optimal dan akuntabel.

Tabel 4.1 Dasar Hukum Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

NO.	Peraturan Perundang-Undangan
1.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491)
2.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Sumber : KesbangpolLampung (2025)

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Sampai Dengan Desember 2024

Jumlah Pegawai	Klasifikasi Pendidikan	Pangkat/ Gol PNS	Jumlah Pejabat	
			Struktural	Fungsional
1	2	3	4	5
PNS : 42	S3 : 0	IV/d : 1	Ess II : 1	
PTHL : 6	S2 : 12	IV/c : 0	Ess III : 5	
	S1 : 17	IV/b : 5	Ess IV : 1	
	DIV : 2	IV/a : 4		
	DIII : 3	III/d : 13		
	SLTA : 7	III/c : 1		
	SLTP : 1	III/b : 4		
	SD : 0	III/a : 8		
			II/d : 3	
			II/c : 2	
		II/b : 1		
		II/a : 0		

Sumber : KesbangpolLampung (2025)

### 4.3 Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kesbangpol Provinsi Lampung memiliki sejumlah fungsi utama yang saling berkaitan. Salah satu fungsi tersebut adalah merumuskan kenijakan di dalam hal kesatuan bangsa juga politik provinsi lampung.

Selain itu, Badan Kesbangpol Provinsi Lampung berfungsi sebagai pelaksana kebijakan dalam berbagai bidang strategis, antara lain pembinaan ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta pemeliharaan ketahanan ekonomi daerah. Fungsi ini juga mencakup upaya menjaga dan memperkuat kerukunan sosial dan antarsuku, pembinaan kebudayaan, serta pembinaan hubungan intra dan antarumat beragama, ras, dan golongan lainnya. Di samping itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung melaksanakan fasilitasi terhadap organisasi

kemasyarakatan, serta menyelenggarakan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung juga menjalankan fungsi koordinasi dengan berbagai perangkat daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, kehidupan demokrasi, serta pemeliharaan stabilitas sosial, ekonomi, dan budaya di daerah.

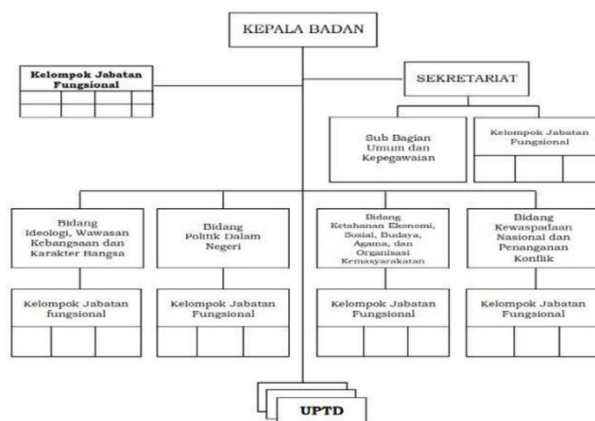
Selanjutnya, instansi ini memiliki fungsi sebagai pemerintah yang mengawasi, memantau dan juga evaluasi pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan antarumat beragama, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi.

Selain fungsi-fungsi tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Lampung juga melaksanakan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

#### **4.4 Struktur Organisasi**

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Kepala Badan tersebut didukung oleh pejabat struktural yang tergabung dalam struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam susunan organisasi instansi :

(Pergub Lampung Nomor: 1 Tahun 2024)



Gambar 4.1 Struktur organisasi badan kesatuan bangsa dan politik daerah provinsi lampung

Sumber : KesbangpolLampung (2025)

#### a. Kepala Badan

Kepala Dinas Kesbangpol Provinsi Lampung memainkan peran strategis dalam pengelolaan urusan pemerintahan di bidang persatuan nasional dan politik di tingkat provinsi. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas bertanggung jawab merumuskan kebijakan teknis di bidang persatuan nasional dan politik sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, Kepala Dinas juga melaksanakan kebijakan terkait pengembangan ideologi Pancasila dan penguatan wawasan nasional, pelaksanaan politik dalam negeri dan kehidupan demokratis, serta menjaga ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya daerah.

Lebih lanjut, Kepala Badan berperan dalam pembinaan dan pemeliharaan kerukunan antarsuku, antarumat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta melaksanakan fasilitasi terhadap organisasi kemasyarakatan. Dalam rangka menjaga stabilitas dan ketenteraman daerah, Kepala Badan juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan kewaspadaan nasional serta pengamanan konflik sosial di wilayah Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan kebijakan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung juga menjalankan fungsi koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, kehidupan demokrasi, serta pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Kepala Badan juga melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang-bidang tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi.

#### **b. Sekretariat**

Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung memiliki tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi dan kegiatan setiap unit kerja agar berjalan secara efektif dan efisien.

Dalam menjalankan perannya, Sekretariat menyelenggarakan berbagai fungsi, antara lain melakukan koordinasi serta penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung. Selain itu, Sekretariat juga melaksanakan fungsi hubungan masyarakat dan keprotokolan, serta mengelola administrasi keuangan sebagai bagian dari upaya mendukung akuntabilitas dan tertib administrasi instansi.

Sekretariat turut bertanggung jawab dalam pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan aset milik Badan Kesbangpol Provinsi Lampung. Di samping itu, Sekretariat juga melaksanakan pengelolaan urusan aparatur sipil negara, termasuk administrasi kepegawaian, guna menunjang profesionalitas dan kinerja sumber daya manusia di lingkungan instansi. Sekretariat juga melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Secara struktural, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan didukung oleh Subbagian Umum dan Kepegawaian serta Kelompok Jabatan

Fungsional, yang secara bersama-sama berperan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

**c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa**

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa merupakan salah satu unsur pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung yang memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, pembinaan karakter bangsa, penguatan nilai Bhinneka Tunggal Ika, serta pelestarian sejarah kebangsaan. Pelaksanaan tugas tersebut bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat persatuan serta kesatuan bangsa di wilayah Provinsi Lampung.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa menyelenggarakan berbagai fungsi strategis, antara lain menyusun program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, nilai-nilai kebhinekaan, serta sejarah kebangsaan di tingkat provinsi. Selain itu, bidang ini juga berperan dalam merumuskan kebijakan teknis yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di bidang tersebut.

Bidang ini juga bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, penguatan Bhinneka Tunggal Ika, dan sejarah kebangsaan. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di wilayah Provinsi Lampung.

Selain fungsi-fungsi tersebut, bidang ini juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara struktural, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa

didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang berperan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi bidang secara optimal.

**d. Bidang Politik Dalam Negeri**

Bidang Politik Dalam Negeri merupakan salah satu unsur pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, pembinaan etika dan budaya politik, peningkatan kualitas demokrasi, serta fasilitasi kelembagaan pemerintahan, lembaga perwakilan, dan partai politik. Selain itu, bidang ini juga memiliki peran dalam penyelenggaraan dan fasilitasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, serta melakukan pemantauan terhadap dinamika dan situasi politik di wilayah Provinsi Lampung.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan berbagai fungsi, antara lain menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika dan budaya politik, penguatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, lembaga perwakilan dan partai politik, pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, serta pemantauan kondisi politik di tingkat provinsi. Bidang ini juga menyusun bahan perumusan kebijakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan di bidang politik dalam negeri.

Selanjutnya, Bidang Politik Dalam Negeri melaksanakan kebijakan dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pendidikan politik, pembinaan etika politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan dan partai politik, serta penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja, bidang ini juga melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, guna memastikan pencapaian tujuan dan efektivitas kebijakan di bidang politik dalam negeri.

Selain melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, Bidang Politik Dalam Negeri juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara struktural, Bidang Politik Dalam Negeri didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang berperan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi bidang secara optimal.

**e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan**

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan merupakan salah satu unsur pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung yang memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, bidang ini juga berperan dalam fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, pembinaan dan fasilitasi kerukunan umat beragama serta penghayatan terhadap kepercayaan, serta pengelolaan organisasi kemasyarakatan. Pengelolaan tersebut meliputi pendaftaran organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa antarormas, serta pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Provinsi Lampung.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan berbagai fungsi strategis, antara lain menyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, pembinaan kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan, serta pengelolaan organisasi kemasyarakatan. Bidang ini juga menyusun bahan perumusan kebijakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan di bidang-bidang tersebut.

Selanjutnya, bidang ini melaksanakan kebijakan dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka penguatan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba,

pembinaan kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan, serta pelaksanaan pendaftaran, evaluasi, mediasi sengketa, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi kemasyarakatan asing di wilayah provinsi.

Sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan juga melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu, bidang ini melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara struktural, bidang ini didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang berperan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi bidang secara optimal.

**f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik**

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dalam bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, serta lembaga asing, kewaspadaan wilayah perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan kewaspadaan, dan penanganan konflik di tingkat provinsi.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi. Selain itu, bidang ini juga menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam bidang-bidang tersebut.

Selanjutnya, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap

pelaksanaan kewaspadaan dini dan penanganan konflik di wilayah provinsi, serta menjalankan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangannya. Bidang ini didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional dalam menjalankan tugas dan fungsinya

#### 4.5 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung

##### a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung terdiri atas 7 jabatan struktural berdasarkan bagan struktur organisasi, yaitu:

1. Kepala Badan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
2. Sekretaris sebagai Pejabat Administrator;
3. Kepala Bidang sebagai Pejabat Administrator; serta
4. Kepala Subbagian sebagai Pejabat Pengawas.

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung berdasarkan kualifikasi pendidikan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Komposisi ASN pada Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Menurut Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Strata 3	1	-	1
2.	Strata 2	10	4	14
3.	Strata 1	9	4	13
4.	D4	1	2	3
5.	Sarmu / D3	2	1	3
6.	SLTA	6	1	7
7.	SLTP	-	-	-
8.	SD	-	-	-
	Jumlah	29	12	41

Sumber : KesbangpolLampung (2025)

Kondisi sumber daya manusia di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung tergolong cukup baik, dengan 28,57% pegawai berpendidikan Strata Dua (S2) dan 40,48% berpendidikan Strata Satu (S1), sementara sisanya memiliki kualifikasi pendidikan sarjana muda ke bawah. Namun demikian, apabila ditinjau dari kesesuaian antara bidang tugas dan

kompetensi yang dimiliki, masih terdapat pegawai yang belum sepenuhnya memenuhi formasi, persyaratan, maupun tuntutan pekerjaan yang ada.

Ditinjau dari kepangkatan/golongan, komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung didominasi oleh Golongan III, dengan rincian sebagai berikut:

1. Golongan IV sebanyak 9 orang;
  2. Golongan III sebanyak 28 orang;
  3. Golongan II sebanyak 4 orang; dan
  4. Golongan I sebanyak 0 orang.
- b. Perlengkapan

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan optimal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana penunjang. Ketersediaan alat-alat perlengkapan tersebut berperan penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi, koordinasi, serta pelayanan kepada masyarakat. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki meliputi:

Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana

No.	SARANA DAN PRASARANA	JML	BAIK	KURANG BAIK	KET
1.	Kendaraan Roda Empat				
	a. Jeep Daihatsu BE 880 AZ	1		Kurang Baik	
	b. Mini Bus Toyota Kijang BE 2936 AZ	1	Baik		
	c. Mini Bus Daihatsu Pick Up BE 9823 AZ	1	Baik		
	d. Mini Bus Maven DX GLX BE 2517 AY	1	Baik		
	e. Toyota Innova E BE 30				
	f. Toyota Avanza Seri V BE 2815BZ	1	Baik		
		1	Baik		
2.	Kendaraan Roda Dua	1	Baik		
	a. Yamaha Jupiter MX BE 3258 CZ				
3.	Mesin ketik manual	10	3Baik	7 KurangBaik	
4.	PC Unit Komputer	20	17Baik	3 KurangBaik	
5.	Printer	20	19Baik	2 KurangBaik	
6.	Laptop/Notebook	16	7Baik	9 KurangBaik	
7.	Scanner	1	Baik		
8.	AC	35	33 Baik	2 KurangBaik	
9.	Overhead Projektor	2		2 KurangBaik	
10.	Kursi Pejabat Ess. III	5	Baik		
11.	Kursi Putar	150	90Baik	60 KurangBaik	
12.	Kusi Lipat	121	60Baik	61 KurangBaik	
13.	Sofa	2	Baik		
14.	Meja kerja pegawai non struktural	3	Baik		
15.	Meja ½ biro	22	Baik		
16.	Meja Komputer	6	4Baik	2 KurangBaik	Rusak
17.	Meja Rapat	22	Baik		
18.	Meja Piket	1	Baik		
19.	Lemari besi/metal	3	Baik		
20.	Rak besi/metal	6	Baik		

No.	SARANA DAN PRASARANA	JML	KONDISI		KET
			BAIK	KURANG BAIK	
21.	Rak Kayu	1	Baik		
22.	Fillingbesi/metal	51	11Baik	40 KurangBaik	
23.	Brankas	10	5Baik	5 KurangBaik	
24.	Papan nama instansi	1	Baik		
25.	Papan Pengumuman	4	2Baik	2 KurangBaik	
26.	White board	6	5Baik	1 KurangBaik	
27.	Peta	8	4Baik	3 KurangBaik	
28.	Televisi	12	Baik		
29.	Sound system	5	3Baik	2 KurangBaik	
30.	UPS	5	3Baik	2 KurangBaik	
31.	LCD	1	Baik		
32.	Stabilisator	2		2 KurangBaik	
33.	Kamera Film	2	Baik		
34.	Kamera + Attachmen	6	4Baik	2 KurangBaik	
35.	Handycam	6		5 KurangBaik	Rusak
36.	Handy Talkie	6	Baik		
37.	Faximile	4	2Baik	2 KurangBaik	
38.	Stabilizer	1	Baik		
39.	Bel Listrik	1	Baik		
40.	Tower Air	1	Baik		
41.	Mesin pompa air jet pump	1	Baik		
42.	Mesin pompa air pendorong	2	Baik		
43.	Tutup mesin pompa dan pendorong air	3	Baik		
44.	Hordeng dan perengkapannya	380m /120m	Baik		
45.	Buku Perundang-undangan	72	Baik		
46.	Dispenser	1	Baik		
47.	Spring Bed	7	Baik		
48.	Absensi Sidik Jari	1	Baik		
49.	CCTV	8	Baik		
50.	Vacum Cleaner	1	Baik		
51.	Web Camera	1	Baik		

Sumber : KesbangpolLampung (2025)

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi aplikasi SIORMAS dan SIULA di Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa kebijakan digitalisasi pelayanan administrasi organisasi kemasyarakatan telah berjalan secara formal dan operasional, namun belum sepenuhnya optimal dalam mendukung efektivitas tata kelola ormas di Provinsi Lampung. Implementasi aplikasi telah membantu proses pendaftaran dan penataan data ormas menjadi lebih sistematis dan terdokumentasi secara digital. Akan tetapi, pemanfaatannya dalam aspek pelaporan, pembinaan, dan pengawasan masih belum maksimal.

Ditinjau dari faktor komunikasi, penyampaian informasi kebijakan kepada ormas telah dilakukan melalui koordinasi langsung dan kegiatan sosialisasi. Namun, kegiatan sosialisasi belum berlangsung secara rutin dan terjadwal akibat keterbatasan anggaran, sehingga tingkat pemahaman ormas terhadap penggunaan aplikasi masih beragam. Sebagian ormas bersifat kooperatif dan mampu mengikuti perkembangan sistem, sementara sebagian lainnya masih pasif dan menunggu pendampingan dari aparat. Pada sisi komunikasi internal, telah terdapat kejelasan penugasan operator melalui surat tugas pimpinan, tetapi koordinasi teknis dan evaluasi pelaksanaan belum dilakukan secara berkala dan sistematis.

Dari aspek sumber daya, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu hambatan utama. Jumlah perangkat komputer yang tersedia di bidang terkait masih terbatas dan sebagian merupakan perangkat lama dengan spesifikasi yang kurang mendukung kinerja aplikasi berbasis daring. Selain itu, dukungan

anggaran yang belum sepenuhnya memadai berdampak pada terbatasnya kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta pengembangan sistem. Kapasitas sumber daya manusia, baik di internal aparatur maupun di kalangan ormas, juga belum merata dalam hal literasi digital.

Pada aspek disposisi, aparatur pelaksana menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam menjalankan kebijakan. Namun, variasi respons ormas terhadap kewajiban pelaporan dan pembaruan data melalui aplikasi menunjukkan bahwa komitmen di tingkat pengguna belum sepenuhnya kuat. Hal ini berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan fitur pelaporan kegiatan sebagai dasar pengawasan dan pengambilan kebijakan.

Dari aspek struktur birokrasi, pembagian tugas dan kewenangan telah jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi aplikasi belum dilakukan secara konsisten, sehingga beberapa kendala teknis maupun administratif belum tertangani secara komprehensif. Sementara itu, dari sisi faktor politik, dukungan terhadap digitalisasi pelayanan telah ada dalam bentuk kebijakan dan regulasi, namun belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan sumber daya secara proporsional.

Secara keseluruhan, faktor komunikasi dan sumber daya merupakan faktor yang paling dominan memengaruhi belum optimalnya implementasi aplikasi SIORMAS dan SIULA. Kedua faktor ini berdampak langsung terhadap tingkat pemanfaatan sistem oleh ormas serta efektivitas pelayanan administrasi yang berbasis digital.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

Pertama, perlu dilakukan penguatan strategi komunikasi kebijakan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan secara terjadwal dan berkelanjutan. Sosialisasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga praktis dengan pendampingan penggunaan aplikasi, sehingga dapat meningkatkan

literasi digital dan kemandirian ormas dalam melakukan pendaftaran, pembaruan data, serta pelaporan kegiatan.

Kedua, pemerintah daerah perlu meningkatkan dukungan sumber daya, khususnya dalam bentuk penambahan dan pembaruan perangkat komputer dengan spesifikasi yang memadai, peningkatan kualitas jaringan internet, serta alokasi anggaran yang lebih proporsional untuk mendukung operasional, pelatihan, dan pengembangan sistem.

Ketiga, optimalisasi aplikasi perlu diarahkan pada pemanfaatan seluruh fitur yang tersedia, terutama fitur pelaporan kegiatan dan pembaruan data berkala. Dapat dipertimbangkan penerapan mekanisme pengingat digital, evaluasi administrasi berbasis kepatuhan pelaporan, serta integrasi data sebagai dasar monitoring dan pengawasan ormas secara lebih objektif dan efisien.

Keempat, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi aplikasi, baik dari sisi teknis sistem maupun dari sisi kepatuhan pengguna. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kendala, menilai efektivitas kebijakan, serta merumuskan langkah perbaikan yang berkelanjutan.

Kelima, aplikasi SIORMAS dan SIULA sebaiknya dikembangkan tidak hanya sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai media pembinaan dan komunikasi kebijakan secara daring, sehingga hubungan antara pemerintah daerah dan ormas dapat terjalin lebih aktif, transparan, dan responsif.

Dengan adanya penguatan pada aspek komunikasi, sumber daya, pemanfaatan sistem, serta evaluasi berkelanjutan, diharapkan implementasi aplikasi SIORMAS dan SIULA dapat berjalan lebih efektif, efisien, akuntabel, serta mampu mendukung terciptanya tata kelola organisasi kemasyarakatan yang tertib administrasi dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, M. N., & Muhammad, A. M. (2024). Implementasi e-government pada layanan informasi publik berbasis website smart desa digital di Desa Tegal Angus Kecamatan Teluknaga. *Jurnal Mimbar Administrasi*.
- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi Revisi). Alfabeta.
- Agustino, Leo. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ahmadi, R., Erfina, E., Asad, M. A., & Dema, H. (2025). Communication in implementation of public policy: Case study of digital population identity socialization. *Jurnal Administrasi Publik*, 21(2).
- Ali, M., Erlambang, N., Salsabila, E. H., & Jailani, M. A. (2022). Implementasi program digitalisasi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi: Serpihan pemikiran hukum, media, dan hak asasi manusia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Azhar, A. W. (2025). Pengaruh komunikasi yang dimediasi partisipasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan publik. *Jurnal Education and Development*, 13(1).
- Bungin, B. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. (n.d.). *SIORMAS*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Retrieved September 17, 2025, from <https://siormas.kemendagri.go.id/>
- Irawan, B., Roesminingsih, M. V., Widodo, B. S., & Roesminingsih, E. (2024). The effect of communication and resources on policy implementation. *Migration Letters*, 21(4), 88–97.

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521). Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (n.d.). *SIULA*. Retrieved September 17, 2025, from <https://siula.kemendagri.go.id/>
- Khumaidi, A., & Irsyad, M. (2023). *Hambatan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*.
- Latip, L., Mirza, D., Lastri, N., & Aditiya, V. (2025). Optimizing digital public services for enhanced citizen satisfaction and transparent governance. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(6), 4563–4574.
- Luthan, S. (2014). *Hukum organisasi kemasyarakatan di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2021). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 38(1).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode baru* (T. R. Rohidi, Penerj.). UI Press.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nuraminah, A., Purwanto, A. N. I., Deswindi, L., Billah, M., Yatimah, M. N., & Novella, T. J. (2021). Pendampingan pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya digitalisasi data organisasi kemasyarakatan asing. *Senabdikom: Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Putri, B. K., Putri, N. E., & Umar, G. (2025). Optimalisasi pelayanan publik melalui sistem digital dalam mewujudkan efisiensi dan integrasi layanan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(1), 1309–1315.
- Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan* (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430). Jakarta: Sekretariat Negara.

- Subarsono, A. G. (2011). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrir, R. N. A. R. (2025). The transformation of policy communication through social media: A theoretical approach to digital governance. In *Proceedings of the 5th ASPIKOM International Communication Conference*.
- Wattimena, D., Idris, M., Hamson, Z., & Abdullah, Z. (2025). Inter-agency communication in government policy implementation. *Jurnal Ilmiah Pranata Edu*, 6(3).
- Wignjosuebrot, S. (2002). *Hukum: Paradigma, metode, dan dinamika masalahnya*. Jakarta: ELSAM & Huma.
- Winarno, Budi. (2022). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: CAPS.
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Quanta: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan*, 2(2), 83–91
- Yungkul, Y. (2025). Optimalisasi sistem administrasi publik dalam meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan di era digital. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(7), 3103–3111.
- Zaenudin, H. N., Sartika, R., & Haryanegara, M. E. A. (2024). The effectiveness of policy communication in public programs. *Informasi*, 51(2).